



PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama tahun anggaran 2025.

Laporan ini memuat gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja Pemerintah Kota Batam di berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, infrastruktur, serta pelayanan publik. Penyusunan laporan ini berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah masih terdapat berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, kritik dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, termasuk jajaran Pemerintah Kota Batam, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktifnya.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Dengan semangat kerja sama dan sinergi yang kuat, kami optimistis bahwa Kota Batam akan terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Batam, 31 Maret 2026



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	
1.1 Penjelasan Umum	
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	..
2.1 Capaian Kinerja Makro	
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan	
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota	
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1 Urusan Pendidikan	
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	
4.1.3. Realisasi	
4.1.4. Alokasi Anggaran	
4.1.5. Dukungan Personil	
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	
4.2 Urusan Kesehatan	
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	
4.2.3. Realisasi	
4.2.4. Alokasi Anggaran	

4.2.5. Dukungan Personil	
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	
4.3.3. Realisasi	
4.3.4. Alokasi Anggaran	
4.3.5. Dukungan Personil	
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	
4.4.3. Realisasi	
4.4.4. Alokasi Anggaran	
4.4.5. Dukungan Personil	
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	
4.5.3. Realisasi	
4.5.4. Alokasi Anggaran	
4.5.5. Dukungan Personil	
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	
4.6 Urusan Sosial	
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	
4.6.3. Realisasi	
4.6.4. Alokasi Anggaran	
4.6.5. Dukungan Personil	
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	
4.7 Program dan Kegiatan	
BAB V PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom merupakan proses transisi hukum yang signifikan, yang secara formal ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dalam strukturnya yang kompleks, undang-undang ini tidak hanya melahirkan entitas administratif baru, tetapi juga mengatur pembagian wilayah kekuasaan, pengalihan aset, serta penataan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kabupaten induk dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota yang baru terbentuk.

Landasan hukum ini menjadi krusial karena Batam memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (sekarang BP Batam). Oleh karena itu, undang-undang tersebut harus menyinkronkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Kota Batam yang menjalankan fungsi otonomi daerah dan badan otorita yang berwenang dalam pengelolaan lahan serta investasi. Selain itu, produk hukum ini merinci batas-batas geografis secara tegas, termasuk koordinat wilayah laut dan pulau-pulau penyangga di sekitarnya, guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.

b. Data Geografis Wilayah

Kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, yakni di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura. Wilayah ini berada di antara 0°25'29" Lintang Utara hingga 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" Bujur Timur hingga 104°26'04" Bujur Timur. Sebagai kota kepulauan, Batam memiliki batas-batas wilayah yang didominasi oleh perairan, di mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura, sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, sebelah barat dengan Kabupaten Karimun, serta sebelah timur dengan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Bentang alam Kota Batam mencakup lebih dari 300 pulau, dengan tiga pulau utama yang saling terhubung melalui infrastruktur jembatan, yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang (dikenal sebagai wilayah Bareleng). Luas wilayah daratannya mencapai sekitar 1.038,84 km², sementara luas wilayah lautnya jauh lebih besar, yakni mencapai 2.950,26 km². Secara topografi, daratan Batam memiliki variasi yang cukup beragam mulai dari dataran rendah, perbukitan yang bergelombang, hingga wilayah pesisir pantai dengan titik tertinggi berada di sekitar 161 meter di atas permukaan laut.

Kondisi geologisnya sebagian besar terdiri dari batuan sedimen dan batuan malihan, dengan karakteristik tanah yang didominasi oleh jenis podsolik merah kuning yang memiliki tingkat kesuburan terbatas namun sangat stabil untuk

pembangunan infrastruktur industri dan perkotaan. Sebagai wilayah beriklim tropis, Batam memiliki suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 33°C dengan kelembapan yang cukup tinggi dan curah hujan yang tersebar sepanjang tahun, mengingat wilayah ini tidak memiliki musim kemarau yang benar-benar ekstrem karena pengaruh kuat dari angin monsun.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Batam



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam

Posisi strategis Batam di jalur pelayaran internasional, serta kedekatannya dengan Singapura yang berjarak sekitar 20 km, menjadikannya sebagai pusat industri dan perdagangan yang vital. Kota ini juga merupakan bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di berbagai sektor.

Dengan infrastruktur yang terus berkembang dan letak geografis yang menguntungkan, Batam berperan penting sebagai gerbang perdagangan dan industri di Indonesia, serta menjadi magnet bagi investasi domestik dan internasional.

c. Jumlah Penduduk

Kota Batam merupakan salah satu pusat pertumbuhan populasi tercepat di Indonesia karena statusnya sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas yang menarik arus migrasi tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Batam saat ini telah melampaui angka 1,2 juta jiwa. Pertumbuhan ini didominasi oleh kelompok usia produktif yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga menjadikan Batam sebagai miniatur Nusantara dengan komposisi etnis yang sangat beragam, mulai dari suku

Melayu sebagai penduduk asli, hingga suku Jawa, Batak, Minang, Tionghoa, dan Bugis yang hidup berdampingan.

Tabel 1.1 Persebaran Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Klasifikasi Wilayah
1	Belakang Padang	23,64	Permukiman
2	Bulang	10,87	Permukiman
3	Galang	17,33	Wisata, Perkebunan, Pertanian, Permukiman dan Industri
4	Sungai Beduk	100,74	Permukiman dan Industri
5	Sagulung	236,41	Permukiman Padat dan Industri
6	Nongsa	99,18	Pariwisata, Permukiman dan Industri
7	Batam Kota	210,27	Pusat Pemerintahan, Bisnis dan Permukiman Padat
8	Sekupang	186,11	Pemerintahan, Permukiman dan Industri
9	Batu Aji	139,91	Permukiman
10	Lubuk Baja	82,95	Permukiman dan Bisnis
11	Batu Ampar	58,84	Permukiman, Bisnis dan Industri
12	Bengkong	130,71	Permukiman dan Wisata
Kota Batam		1,296,96	

Sumber: Kota Batam Dalam Angka 2025

Secara distribusi spasial, kepadatan penduduk di Batam tidak merata dan terpusat di wilayah daratan utama (*mainland*). Kecamatan Sagulung dan Batam Kota tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak; Sagulung sering menjadi area permukiman padat bagi pekerja industri, sementara Batam Kota menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis. Sebaliknya, wilayah hinterland seperti Kecamatan Bulang dan Galang memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah dengan karakteristik penduduk yang mayoritas bergerak di sektor perikanan dan perkebunan.

Struktur kependudukan Batam juga mencerminkan karakteristik kota industri dengan angka partisipasi angkatan kerja yang sangat tinggi. Rasio jenis kelamin di kota ini relatif seimbang, meskipun di beberapa kawasan industri manufaktur tertentu sering terdapat konsentrasi pekerja perempuan yang lebih tinggi. Selain itu, sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Singapura, Batam memiliki mobilitas penduduk nonpermanen yang tinggi, termasuk tenaga kerja asing dan wisatawan lintas batas yang memengaruhi dinamika sosial-ekonomi kota setiap harinya.

d. Jumlah Kecamatan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, sehingga jumlah kecamatan di Kota Batam semula 8 Kecamatan berubah menjadi 12 kecamatan dan 64 Kelurahan.

Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam) sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan.

Tabel 1.2 Pembagian Daerah Administratif Kota Batam

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Daratan (km ²)
Belakang Padang	6	30,83
Bulang	6	61,67
Galang	8	350,59
Sungai Beduk	4	38,04
Nongsa	4	91,42
Sekupang	7	58,51
Lubuk Baja	5	11,42
Batu Ampar	4	17,89
Batam Kota	6	107,33
Sagulung	6	63,47
Batu Aji	4	40,36
Bengkong	4	19,27

Sumber: Bappeda Kota Batam

Kecamatan Galang merupakan wilayah dengan luas daratan terbesar karena mencakup gugusan pulau-pulau di bagian selatan, termasuk situs sejarah pengungsi Vietnam. Sebaliknya, Lubuk Baja adalah kecamatan terkecil namun memiliki kepadatan bangunan tertinggi karena berperan sebagai pusat bisnis utama atau jantung kota. Dominasi wilayah perairan di kecamatan seperti Belakang Padang dan Bulang menjadikan transportasi laut sebagai urat nadi utama bagi masyarakat di sana.

Wilayah per kecamatan di Kota Batam menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan antara wilayah daratan utama (mainland) dan wilayah kepulauan (hinterland). Kecamatan Galang tampil sebagai wilayah terluas dengan cakupan mencapai 350,59 km² atau sekitar sepertiga dari total daratan kota, yang didominasi oleh gugusan pulau-pulau besar seperti Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kontras dengan hal tersebut, pusat ekonomi lama seperti

Lubuk Baja dan Batu Ampar justru memiliki luas daratan terkecil, masing-masing hanya 11,42 km² dan 17,89 km². Fenomena ini mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis dan perdagangan Batam terkonsentrasi di lahan yang sangat terbatas namun memiliki nilai ekonomi dan densitas bangunan yang sangat tinggi.

Di sisi lain, kecamatan seperti Batam Kota (107,33 km²) dan Nongsa (91,42 km²) memiliki posisi strategis karena mengombinasikan ketersediaan lahan yang cukup luas dengan infrastruktur vital seperti pusat pemerintahan dan bandara internasional. Hal ini menjadikan kedua wilayah tersebut sebagai zona pengembangan utama bagi ekspansi perkotaan di masa depan. Sementara itu, wilayah seperti Sagulung dan Batu Aji, meskipun memiliki luas wilayah yang moderat, memikul beban kependudukan yang besar karena berperan sebagai penyangga utama bagi kawasan industri.

Secara keseluruhan, struktur luas wilayah ini mencerminkan karakteristik Batam sebagai kota kepulauan yang heterogen. Wilayah dengan luas terkecil cenderung berfungsi sebagai pusat pertumbuhan intensif (*intensive growth*), sedangkan wilayah luas seperti Galang dan Bulang masih menyimpan potensi pengembangan lahan yang besar (*extensive growth*) namun saat ini fungsinya masih terbatas pada sektor perikanan, konservasi, dan proyek strategis nasional. Perbedaan skala luas wilayah ini menuntut pendekatan perencanaan kota yang berbeda antara pengelolaan kawasan urban padat di utara dengan kawasan konservasi dan maritim di bagian selatan.

- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
 - i. Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Batam dibantu oleh beberapa perangkat daerah.

Tabel 1.3 Susunan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Batam

No	Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
3	Inspektorat Daerah Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
Dinas Daerah		

1	Dinas Pendidikan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
2	Dinas Kesehatan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
3	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
4	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
6	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
8	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
9	Dinas Tenaga Kerja Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
12	Dinas Perikanan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
13	Dinas Pertanahan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
14	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023

16	Dinas Perhubungan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
19	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
20	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe B	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
21	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
Badan Daerah		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
3	Badan Pendapatan Daerah Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
7	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
Kecamatan		

1	Kecamatan Belakang Padang Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
2	Kecamatan Batu Ampar Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
3	Kecamatan Sekupang Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
4	Kecamatan Nongsa Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
5	Kecamatan Bulang Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
6	Kecamatan Lubuk Baja Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
7	Kecamatan Sungai Beduk Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
8	Kecamatan Galang Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
9	Kecamatan Bengkong Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
10	Kecamatan Batam Kota Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
11	Kecamatan Sagulung Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
12	Kecamatan Batu Aji Tipe A	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
Unit Pelaksana Teknis Daerah		
1	UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
2	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
3	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023

4	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
5	UPTD Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
6	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
7	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
8	UPTD Pelayanan Jasa Transportasi Pada Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
9	UPTD Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
10	UPTD Museum Batam Raja Ali Haji Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
11	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
12	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
13	UPTD Rumah Susun Sewa Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
14	UPTD Kebun Raya Batam Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
15	UPTD Air Bersih Pada Cipta Karya Dan Tata Ruang	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
16	UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara Pada Cipta Karya Dan Tata Ruang	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023

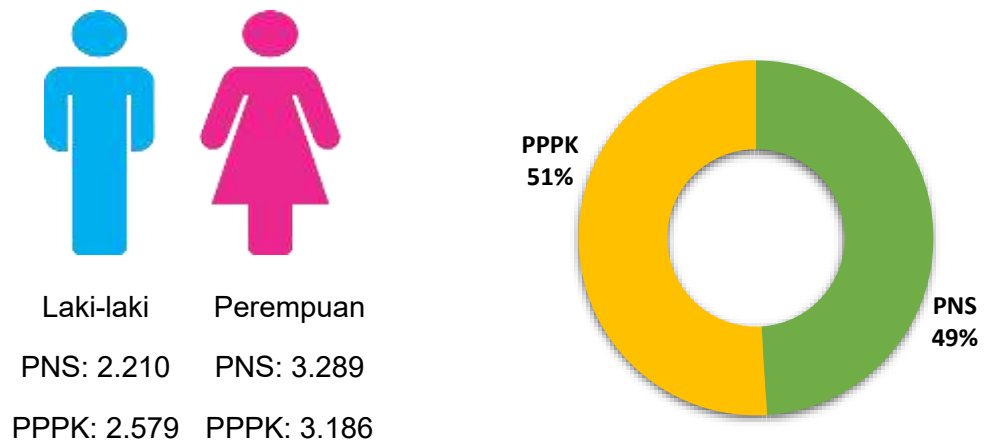
17	UPTD P2MKS Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2023
----	--	--

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Batam Tahun 2025

ii. Pegawai Pemerintah

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2025 sejumlah 11.264 orang yang terdiri dari 5.499 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gambar 1.1 Presentase Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batam



Tabel 1.4 Jumlah ASN Kota Batam Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS			PPPK			ASN
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	SD	11	1	12	48	14	62	74
2	SLTP	11	2	13	14	5	19	32
3	SLTA	339	100	439	922	276	1.198	1.637
4	SMK	42	17	59	149	20	169	228
5	SPG	3	-	3	-	-	-	3
6	D-I	2	1	3	-	-	-	3
7	D-II	14	17	31	-	-	-	31
8	D-III	114	515	629	134	455	589	1.218
9	D-IV	78	102	180	22	59	81	261
10	S-1	1.200	2.293	3.593	1.261	2.294	3.555	7.148

11	S-2	293	239	532	29	63	92	624
12	S-3	3	2	5	-	-	-	5
TOTAL		2.210	3.289	5.499	2.579	3.186	5.765	11.264

Sumber: BKPSDM Kota Batam

Tabel 1.5 Jumlah ASN Kota Batam Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	PNS			PPPK			ASN
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	Jabatan Struktural	486	275	761	-	-	-	761
2	Jabatan Fungsional	965	2.318	3.283	1.336	2.684	4.020	7.303
3	Jabatan Pelaksana	759	696	1.455	1.243	502	1.745	3.200
TOTAL		2.210	3.289	5.499	2.579	3.186	5.765	11.264

Sumber: BKPSDM Kota Batam

Tabel 1.6 Jumlah ASN Kota Batam Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	Jumlah
1	Sekretariat Daerah Kota Batam	159	148	307
2	Inspektorat Daerah	85	3	88
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49	7	56
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	39	6	45
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	0	10
6	Badan Pendapatan Daerah	105	96	201
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	75	10	85
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48	10	58
9	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	8	1	9
10	Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air	73	99	172
11	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	51	91	142
12	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	39	14	53
13	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	26	34	60
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	74	27	101
15	Dinas Kesehatan	1.116	884	2.000
16	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	35	38	73
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	35	59	94

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	Jumlah
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	39	17	56
19	Dinas Lingkungan Hidup	66	42	108
20	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	36	58	94
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	47	15	62
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40	27	67
23	Dinas Pendidikan	2.030	2.886	4.196
24	Dinas Perhubungan	69	123	192
25	Dinas Perikanan	45	45	90
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	49	35	84
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	36	5	41
28	Dinas Pertanahan	24	8	32
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	45	154	199
30	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	37	22	59
31	Dinas Tenaga Kerja	41	22	63
32	Satuan Polisi Pamong Praja	181	405	586
33	Sekretariat Dprd	57	109	166
34	Kecamatan Batam Kota	66	20	86
35	Kecamatan Batu Aji	38	23	61
36	Kecamatan Batu Ampar	43	25	68
37	Kecamatan Belakang Padang	54	28	82
38	Kecamatan Bengkong	42	19	61
39	Kecamatan Bulang	49	17	66
40	Kecamatan Lubuk Baja	47	26	73
41	Kecamatan Galang	64	28	92
42	Kecamatan Nongsa	54	17	71
43	Kecamatan Sagulung	55	17	72
44	Kecamatan Sekupang	74	23	97
45	Kecamatan Sungai Beduk	36	22	58
46	Staf Ahli	3	-	3
47	Cuti Di Luar Tanggungan Negara/Diperbantukan	5	-	5
TOTAL		5.499	5.765	11.264

Sumber: BKPSDM Kota Batam

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Total pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp4,14 triliun atau mencapai 96,47% dari target anggaran sebesar Rp4,29 triliun. Capaian ini didorong oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,25 triliun (95,28%) dan Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1,88 triliun (97,91%). Di sisi pengeluaran, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp4,00 triliun dari total anggaran Rp4,43 triliun, atau setara dengan 90,43%. Sebagian besar belanja dialokasikan untuk Belanja Operasi yang terealisasi sebesar Rp3,19 triliun, di mana komponen utamanya adalah Belanja Pegawai yang menyerap anggaran sebesar Rp1,71 triliun (93,52%). Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan performa yang cukup stabil dengan tingkat realisasi pendapatan dan belanja yang terjaga di atas 90%.

Tabel 1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)
PENDAPATAN DAERAH	4,295,914,720,511.00	4,144,664,860,434.52	96.47
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,364,427,539,406.00	2,253,056,374,966.44	95.28
Pajak Daerah	1,951,950,293,317.00	1,883,230,865,215.80	96.47
Pajak Reklame	24,000,000,000.00	17,771,669,900.00	74.04
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	20,601,942,480.00	14,716,450,242.00	71.43
Pajak Reklame Kain	2,033,494,320.00	1,540,650,800.00	75.76
Pajak Reklame Melekat/Stiker	0.00	600,000.00	0.00
Pajak Reklame Berjalan	1,364,563,200.00	1,507,968,858.00	110.50
Pajak Reklame Udara	0.00	6,000,000.00	0.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4,363,200,000.00	3,388,616,718.00	77.66
Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	4,363,200,000.00	3,388,616,718.00	77.66
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	275,000,000,000.00	233,608,992,080.00	84.94
PBBP2	275,000,000,000.00	233,608,992,080.00	84.94
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	495,000,000,000.00	540,559,866,591.00	109.20
BPHTB-Pemindahan Hak	495,000,000,000.00	540,559,866,591.00	109.20
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	860,732,278,678.00	793,741,219,186.80	92.21
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	172,975,861,879.00	187,290,945,643.00	108.27
PBJT-Tenaga Listrik	410,725,496,236.00	373,685,190,228.00	90.98
PBJT-Jasa Perhotelan	209,287,362,477.00	173,916,049,629.00	83.09
PBJT-Jasa Parkir	16,362,000,000.00	10,764,707,319.00	65.79
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	51,381,558,086.00	48,084,326,367.80	93.58
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	121,134,509,647.00	162,820,296,040.00	134.41
Opsen PKB	121,134,509,647.00	162,820,296,040.00	134.41
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	171,720,304,992.00	131,340,204,700.00	76.48

Opsen BBNKB	171,720,304,992.00	131,340,204,700.00	76.48
Retribusi Daerah	243,307,558,896.00	173,119,418,654.10	71.15
Retribusi Jasa Umum	97,287,612,596.00	64,550,543,858.00	66.35
Retribusi Pelayanan Kesehatan	16,768,904,846.00	14,976,776,918.00	89.31
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	60,000,000,000.00	34,168,780,708.00	56.94
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20,000,000,000.00	15,062,874,848.00	75.31
Retribusi Pelayanan Pasar	500,000,000.00	277,927,250.00	55.58
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	18,707,750.00	54,648,750.00	292.11
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	9,535,384.00	0.00
Retribusi Jasa Usaha	18,019,946,300.00	15,023,584,281.00	83.37
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600,000,000.00	336,288,037.00	56.04
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	61,446,300.00	49,790,000.00	81.03
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1,251,000,000.00	606,540,000.00	48.48
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16,107,500,000.00	14,030,966,244.00	87.10
Retribusi Perizinan Tertentu	128,000,000,000.00	93,545,290,515.10	73.08
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	80,000,000,000.00	48,725,225,915.10	60.90
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	48,000,000,000.00	44,820,064,600.00	93.37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,481,402,255.00	9,481,402,255.00	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9,481,402,255.00	9,481,402,255.00	100.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9,481,402,255.00	9,481,402,255.00	100.00
Lain-lain PAD yang Sah	159,688,284,938.00	187,224,688,841.54	117.24
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	330,000,000.00	507,553,927.00	153.80
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	330,000,000.00	507,553,927.00	153.80
Jasa Giro	6,000,000,000.00	13,470,873,800.63	224.51
Jasa Giro pada Kas Daerah	6,000,000,000.00	13,470,873,800.63	224.51
Pendapatan Bunga	0.00	31,892,699.00	0.00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0.00	31,892,699.00	0.00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1,090,000,000.00	2,073,403,157.49	190.22
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1,090,000,000.00	2,073,403,157.49	190.22
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	850,000,000.00	1,622,694,971.72	190.90
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	850,000,000.00	1,622,694,971.72	190.90
Pendapatan Denda Pajak Daerah	8,336,590,000.00	11,397,765,915.00	136.71
Pendapatan Denda Pajak Hotel	230,513,200.00	706,502,269.00	306.49
Pendapatan Denda Pajak Restoran	232,920,900.00	440,022,230.00	188.91
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	81,713,900.00	137,758,544.00	168.58
Pendapatan Denda Pajak Reklame	252,410,800.00	389,280.00	0.15
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	24,303,300.00	103,325,817.00	425.15

Pendapatan Denda Pajak Parkir	16,189,000.00	41,307,202.00	255.15
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	105,157,000.00	219,542,462.00	208.77
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7,032,031,200.00	9,422,251,611.00	133.99
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	361,350,700.00	326,633,300.00	90.39
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0.00	33,200.00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	114,005,756.70	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0.00	114,005,756.70	0.00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0.00	0.00	0.00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian	410,000,000.00	1,735,237,195.00	423.22
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	200,000,000.00	616,739,222.00	308.36
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200,000,000.00	404,345,911.00	202.17
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0.00	25,254,008.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	3,096,000.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10,000,000.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0.00	685,802,054.00	0.00
Pendapatan BLUD	142,621,694,938.00	156,170,611,419.00	109.49
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	141,655,786,069.00	155,425,851,427.00	109.72
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	661,895,000.00	571,167,000.00	86.29
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	304,013,869.00	173,592,992.00	57.10
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	50,000,000.00	100,650,000.00	201.30
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	50,000,000.00	100,650,000.00	201.30
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,364,427,539,406.00	2,253,056,374,966.44	95.28
PENDAPATAN TRANSFER	1,920,906,528,285.00	1,880,891,846,186.00	97.91
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,613,650,937,666.00	1,566,451,726,494.00	97.07
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	225,730,210,000.00	208,691,720,100.00	92.45
DBH Pajak	207,373,841,000.00	189,485,787,100.00	91.37
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	18,356,369,000.00	19,205,933,000.00	104.62
Dana Alokasi Umum (DAU)	910,526,305,000.00	900,501,837,752.00	98.89
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	761,669,790,000.00	761,447,169,204.00	99.97
DAU yang Ditentukan Penggunaannya	148,856,515,000.00	139,054,668,548.00	93.41
Dana Alokasi Khusus (DAK)	461,997,895,666.00	441,861,641,642.00	95.64
DAK Fisik	20,774,811,000.00	18,123,066,818.00	87.23
DAK Non Fisik	441,223,084,666.00	423,738,574,824.00	96.03
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1,598,254,410,666.00	1,551,055,199,494.00	97.04
Insentif Fiskal	15,396,527,000.00	15,396,527,000.00	100.00
Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	15,396,527,000.00	15,396,527,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	15,396,527,000.00	15,396,527,000.00	100.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	307,255,590,619.00	314,440,119,692.00	102.33
Pendapatan Bagi Hasil	307,255,590,619.00	314,440,119,692.00	102.33
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	307,255,590,619.00	314,440,119,692.00	102.33
Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	307,255,590,619.00	314,440,119,692.00	102.33
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,920,906,528,285.00	1,880,891,846,186.00	97.91
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,580,652,820.00	10,716,639,282.08	101.28
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,580,652,820.00	10,716,639,282.08	101.28
Lain-lain Pendapatan	10,580,652,820.00	10,580,652,820.00	100.00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	10,580,652,820.00	10,580,652,820.00	100.00
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0.00	135,986,462.08	0.00
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0.00	135,986,462.08	0.00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,580,652,820.00	10,716,639,282.08	101.28
JUMLAH PENDAPATAN	4,295,914,720,511.00	4,144,664,860,434.52	96.47
BELANJA DAERAH	4,430,459,623,302.00	4,006,752,859,321.49	90.43
BELANJA OPERASI	3,493,930,834,582.00	3,199,718,630,648.62	91.57
Belanja Pegawai	1,829,342,224,796.00	1,710,944,899,920.00	93.52
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	798,784,440,033.00	745,055,288,958.00	93.27
Belanja Gaji Pokok ASN	533,682,548,430.00	509,156,707,490.00	95.40
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	52,661,325,483.00	47,447,941,304.00	90.10
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8,270,908,312.00	7,656,585,000.00	92.57

Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22,423,620,650.00	21,163,504,000.00	94.38
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16,714,460,647.00	16,165,520,000.00	96.71
Belanja Tunjangan Beras ASN	31,362,214,983.00	28,265,308,740.00	90.12
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	74,380,351,176.77	63,848,328,178.00	85.84
Belanja Pembulatan Gaji ASN	15,481,047.00	7,453,539.00	48.14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	50,904,421,454.23	47,051,862,035.00	92.43
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,281,252,164.00	1,060,129,199.00	82.74
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3,843,756,492.00	3,180,349,473.00	82.74
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3,191,424,194.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Khusus	52,675,000.00	51,600,000.00	97.95
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	947,160,564,089.00	883,448,809,828.00	93.27
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	258,514,681,020.00	237,311,857,984.00	91.79
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	63,178,894,561.00	59,619,005,420.00	94.36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	464,824,745,775.00	438,324,074,306.00	94.29
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	160,642,242,733.00	148,193,872,118.00	92.25
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0.00	0.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0.00	0.00	0.00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0.00	0.00	0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32,244,113,932.00	30,908,573,504.00	95.85
Belanja Uang Representasi DPRD	1,232,116,500.00	1,114,260,000.00	90.43
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	169,895,988.00	128,473,800.00	75.61
Belanja Tunjangan Beras DPRD	217,845,400.00	161,964,600.00	74.34
Belanja Uang Paket DPRD	114,503,350.00	95,508,000.00	83.41
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,673,414,336.00	1,615,677,000.00	96.54
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	162,173,856.00	152,554,500.00	94.06
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	92,250,000.00	17,249,925.00	18.69
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,860,000,000.00	8,820,000,000.00	99.54
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2,236,628,125.00	2,190,300,000.00	97.92
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	156,800,000.00	127,475,423.00	81.29
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9,658,686,377.00	9,088,310,256.00	94.09
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7,580,800,000.00	7,396,800,000.00	97.57
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	89,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4,023,100,129.00	1,013,392,672.00	25.18
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	205,965,000.00	97,500,000.00	47.33
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6,715,800.00	3,708,000.00	55.21

Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105,500,000.00	91,260,000.00	86.50
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6,235,362.00	4,055,520.00	65.04
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2,755,797.00	1,143,472.00	41.49
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,700.00	1,320.00	77.64
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5,760,000.00	5,379,840.00	93.40
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134,316.00	112,320.00	83.62
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402,948.00	336,960.00	83.62
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	3,689,629,206.00	809,895,240.00	21.95
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2,534,037,800.00	2,501,520,000.00	98.71
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402,948,000.00	393,120,000.00	97.56
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2,131,089,800.00	2,108,400,000.00	98.93
Belanja Pegawai BLUD	44,595,968,813.00	48,017,314,958.00	107.67
Belanja Pegawai BLUD	44,595,968,813.00	48,017,314,958.00	107.67
Belanja Barang dan Jasa	1,433,558,453,891.00	1,270,345,200,824.62	88.61
Belanja Barang	274,382,766,694.00	242,204,170,544.69	88.27
Belanja Barang Pakai Habis	262,440,509,669.00	231,104,289,744.69	88.05
Belanja Barang Tak Habis Pakai	11,942,257,025.00	11,099,880,800.00	92.94
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa	614,290,778,478.00	543,169,809,342.00	88.42
Belanja Jasa Kantor	428,570,919,681.00	392,724,862,272.00	91.63
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	70,124,134,721.00	45,928,726,980.00	65.49
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37,169,433,597.00	32,457,241,853.00	87.32
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11,658,701,400.00	10,816,871,888.00	92.77
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5,796,000.00	5,772,000.00	99.58
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6,723,429,628.00	6,129,929,782.00	91.17
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3,685,139,437.00	2,985,196,720.00	81.00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	840,000,000.00	626,500,000.00	74.58
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	55,512,663,014.00	51,494,221,847.00	92.76
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	561,000.00	486,000.00	86.63
Belanja Pemeliharaan	112,414,448,495.00	101,372,988,948.20	90.17
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93,490,525,388.00	84,222,154,731.00	90.08
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,839,609,107.00	16,107,879,525.77	90.29
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,084,314,000.00	1,042,954,691.43	96.18
Belanja Perjalanan Dinas	86,934,318,366.00	74,323,143,728.00	85.49
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86,934,318,366.00	74,323,143,728.00	85.49
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	116,754,475,600.00	88,775,354,663.00	76.03
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95,867,717,900.00	86,005,357,800.00	89.71
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,886,757,700.00	2,769,996,863.00	13.26

Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	103,101,091,476.00	97,951,238,443.73	95.00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	103,101,091,476.00	97,951,238,443.73	95.00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14,040,569,000.00	12,804,561,549.00	91.19
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14,040,569,000.00	12,804,561,549.00	91.19
Belanja Barang dan Jasa BLUD	111,640,005,782.00	109,743,933,606.00	98.30
Belanja Barang dan Jasa BLUD	111,640,005,782.00	109,743,933,606.00	98.30
Belanja Subsidi	8,250,000,000.00	5,257,781,964.00	63.73
Belanja Subsidi kepada BUMN	7,250,000,000.00	5,257,781,964.00	72.52
Belanja Subsidi kepada BUMN	7,250,000,000.00	5,257,781,964.00	72.52
Belanja Subsidi kepada BUMD	1,000,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Subsidi kepada BUMD	1,000,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	214,320,155,895.00	205,008,375,940.00	95.65
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	75,038,944,230.00	71,687,535,945.00	95.53
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	20,707,579,000.00	20,427,011,000.00	98.64
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	54,331,365,230.00	51,260,524,945.00	94.34
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41,996,487,000.00	39,685,080,770.00	94.49
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12,300,791,000.00	11,972,875,688.00	97.33
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21,655,696,000.00	20,382,205,082.00	94.11
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8,040,000,000.00	7,330,000,000.00	91.16
Belanja Hibah Dana BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5,694,784,665.00	5,694,784,665.00	100.00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5,694,784,665.00	5,694,784,665.00	100.00
Belanja Hibah Dana BOSP	91,589,940,000.00	87,940,974,560.00	96.01
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	91,589,940,000.00	87,940,974,560.00	96.01
Belanja Bantuan Sosial	8,460,000,000.00	8,162,372,000.00	96.48
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	60,000,000.00	17,072,000.00	28.45
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	60,000,000.00	17,072,000.00	28.45
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8,400,000,000.00	8,145,300,000.00	96.96
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	8,400,000,000.00	8,145,300,000.00	96.96
JUMLAH BELANJA OPERASI	3,493,930,834,582.00	3,199,718,630,648.62	91.57
BELANJA MODAL	910,208,385,456.00	797,424,490,440.87	87.60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231,624,825,473.00	200,830,976,743.00	86.70
Belanja Modal Alat Besar	44,430,538,000.00	28,296,645,253.00	63.68

Belanja Modal Alat Besar Darat	35,475,274,000.00	20,642,685,253.00	58.18
Belanja Modal Alat Bantu	8,955,264,000.00	7,653,960,000.00	85.46
Belanja Modal Alat Angkutan	52,870,102,178.00	48,155,757,500.00	91.08
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	50,476,479,508.00	45,811,543,000.00	90.75
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10,489,000.00	9,260,000.00	88.28
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2,383,133,670.00	2,334,954,500.00	97.97
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,350,996,000.00	1,208,098,515.00	89.42
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	320,392,000.00	271,200,000.00	84.64
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	44,163,000.00	37,200,000.00	84.23
Belanja Modal Alat Ukur	986,441,000.00	899,698,515.00	91.20
Belanja Modal Alat Pertanian	29,685,000.00	16,600,000.00	55.92
Belanja Modal Alat Pengolahan	29,685,000.00	16,600,000.00	55.92
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44,551,949,893.00	41,610,651,899.00	93.39
Belanja Modal Alat Kantor	3,647,418,560.00	3,051,450,600.00	83.66
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	37,844,202,113.00	35,846,583,309.00	94.72
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,060,329,220.00	2,712,617,990.00	88.63
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8,382,060,790.00	7,931,179,592.00	94.62
Belanja Modal Alat Studio	7,482,766,790.00	7,061,567,192.00	94.37
Belanja Modal Alat Komunikasi	264,108,000.00	242,849,000.00	91.95
Belanja Modal Peralatan Pemancar	635,186,000.00	626,763,400.00	98.67
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8,170,734,023.00	6,299,968,845.00	77.10
Belanja Modal Alat Kedokteran	8,165,471,023.00	6,294,868,845.00	77.09
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5,263,000.00	5,100,000.00	96.90
Belanja Modal Alat Laboratorium	1,319,676,600.00	1,237,468,398.00	93.77
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	293,727,600.00	231,083,408.00	78.67
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	632,793,000.00	613,240,990.00	96.91
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	393,156,000.00	393,144,000.00	99.99
Belanja Modal Komputer	31,374,944,004.00	29,858,032,265.00	95.16
Belanja Modal Komputer Unit	25,829,277,142.00	25,138,385,315.00	97.32
Belanja Modal Peralatan Komputer	5,545,666,862.00	4,719,646,950.00	85.10
Belanja Modal Rambu-Rambu	9,583,133,900.00	9,098,350,426.00	94.94
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	9,583,133,900.00	9,098,350,426.00	94.94
Belanja Modal Peralatan Olahraga	8,280,000.00	6,300,000.00	76.08
Belanja Modal Peralatan Olahraga	8,280,000.00	6,300,000.00	76.08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	17,791,929,436.00	17,299,507,849.00	97.23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	17,791,929,436.00	17,299,507,849.00	97.23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11,760,795,649.00	9,812,416,201.00	83.43

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11,760,795,649.00	9,812,416,201.00	83.43
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234,912,425,046.00	194,830,488,044.16	82.93
Belanja Modal Bangunan Gedung	223,100,417,126.00	185,385,830,431.40	83.09
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	222,802,350,126.00	185,090,605,210.40	83.07
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	298,067,000.00	295,225,221.00	99.04
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10,313,131,100.00	8,673,473,495.76	84.10
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	10,313,131,100.00	8,673,473,495.76	84.10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,498,876,820.00	771,184,117.00	51.45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1,498,876,820.00	771,184,117.00	51.45
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	419,569,434,299.00	378,083,650,868.71	90.11
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	286,526,632,311.00	254,910,184,025.00	88.96
Belanja Modal Jalan	260,322,025,849.00	239,394,943,826.00	91.96
Belanja Modal Jembatan	26,204,606,462.00	15,515,240,199.00	59.20
Belanja Modal Bangunan Air	103,732,644,255.00	94,661,025,067.71	91.25
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	78,396,694,412.00	70,278,088,212.71	89.64
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	25,335,949,843.00	24,382,936,855.00	96.23
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Instalasi	29,269,947,733.00	28,487,441,776.00	97.32
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	14,470,632,000.00	13,779,941,110.00	95.22
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	533,160,000.00	473,120,666.00	88.73
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	14,266,155,733.00	14,234,380,000.00	99.77
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	40,210,000.00	25,000,000.00	62.17
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	40,210,000.00	25,000,000.00	62.17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24,025,700,638.00	23,604,374,785.00	98.24
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	358,962,000.00	354,576,000.00	98.77
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	358,962,000.00	354,576,000.00	98.77
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	525,393,000.00	521,705,000.00	99.29
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	525,393,000.00	521,705,000.00	99.29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	23,141,345,638.00	22,728,093,785.00	98.21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	23,141,345,638.00	22,728,093,785.00	98.21
Belanja Modal Aset Lainnya	76,000,000.00	75,000,000.00	98.68
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	76,000,000.00	75,000,000.00	98.68
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	76,000,000.00	75,000,000.00	98.68
JUMLAH BELANJA MODAL	910,208,385,456.00	797,424,490,440.87	87.60
BELANJA TIDAK TERDUGA	18,820,403,264.00	2,109,738,232.00	11.20
Belanja Tidak Terduga	18,820,403,264.00	2,109,738,232.00	11.20
Belanja Tidak Terduga	18,820,403,264.00	2,109,738,232.00	11.20

Belanja Tidak Terduga	18,820,403,264.00	2,109,738,232.00	11.20
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	18,820,403,264.00	2,109,738,232.00	11.20
BELANJA TRANSFER	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
Belanja Bantuan Keuangan	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
JUMLAH BELANJA	4,430,459,623,302.00	4,006,752,859,321.49	90.43
SURPLUS/DEFISIT	(134,544,902,791.00)	137,912,001,113.03	(102.50)
PEMBIAYAAN DAERAH	134,544,902,791.00	134,544,902,790.86	99.99
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134,544,902,791.00	134,544,902,790.86	99.99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134,544,902,791.00	134,544,902,790.86	99.99
Penghematan Belanja	116,844,521,978.00	116,844,521,978.33	100.00
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	116,844,521,978.00	116,844,521,978.33	100.00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1,534,236,882.00	1,534,236,882.00	100.00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	1,534,236,882.00	1,534,236,882.00	100.00
Sisa Belanja Lainnya	16,166,143,931.00	16,166,143,930.53	99.99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	10,145,257,280.00	10,145,257,279.92	99.99
Sisa Dana BOS	0.00	0.00	0.00
Sisa Dana Kapitasi	0.00	0.00	0.00
Sisa Dana BOSP	6,020,886,651.00	6,020,886,650.61	99.99
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134,544,902,791.00	134,544,902,790.86	99.99
PEMBIAYAAN NETTO	134,544,902,791.00	134,544,902,790.86	99.99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	272,456,903,903.89	0.00

Sumber: LRA Kota Batam Tahun 2025 unaudited

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan draf rancangan teknokratik maupun arah kebijakan RPJMD Kota Batam periode 2025–2029, permasalahan strategis daerah masih berpusat pada upaya memperkuat posisi Batam sebagai hub logistik internasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Isu-isu strategis Kota Batam yang akan dijadikan prioritas penanganan berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Optimalisasi Daya Saing Ekonomi: Meskipun pertumbuhan ekonomi Batam sering berada di atas rata-rata nasional, ketergantungan pada sektor manufaktur dan jasa pelabuhan menuntut adanya diversifikasi ekonomi ke sektor digital dan industri kreatif.
2. Kesenjangan Kualitas Sumber Daya Manusia: Terdapat tantangan dalam menyelaraskan (link and match) antara kurikulum pendidikan vokasi lokal

dengan kebutuhan tenaga kerja ahli di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

3. Daya Dukung Infrastruktur dan Lingkungan: Seiring pesatnya pembangunan fisik, Batam menghadapi isu klasik seperti pengelolaan sampah yang belum terintegrasi, ancaman banjir rob akibat perubahan iklim, serta penyediaan air bersih yang harus menjamin keberlangsungan industri dan domestik.
4. Konektivitas dan Tata Ruang: Sinkronisasi antara pengembangan wilayah industri dengan permukiman padat penduduk masih memerlukan penataan yang lebih inklusif agar tidak menimbulkan kemacetan dan permukiman kumuh (slum area).

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kota Batam berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah:

"Mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Inovatif, Berkelanjutan, dan Berbudaya sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan di Asia Tenggara."

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Batam menetapkan lima misi utama:

1. Pertumbuhan Ekonomi Baru: Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
2. Infrastruktur Berkelanjutan: Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah Batam (termasuk area hinterland).
3. Kualitas SDM: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera, merata, dan berkeadilan melalui SDM yang berdaya saing, produktif, dan berakhlak mulia.
4. Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif berorientasi pada good governance.
5. Pelestarian Budaya dan Lingkungan: Menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal serta kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Visi dan misi di atas diturunkan ke dalam beberapa program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, di antaranya:

1. Air Bersih & Banjir: Optimalisasi pelayanan air bersih dan penanganan titik banjir.
2. Pendidikan: Pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP serta pembangunan ruang kelas baru.
3. Kesehatan: Pengobatan gratis cukup dengan menunjukkan KTP Batam.
4. Ekonomi Kerakyatan: Pinjaman modal tanpa bunga (maksimal Rp20 juta) untuk UMKM.

5. Transportasi: Pengembangan transportasi publik terintegrasi, termasuk rencana pembangunan LRT.
6. Sosial: Insentif untuk lansia dan bantuan untuk pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Unggulan Kepala Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Penanggung jawab
Optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Optimalisasi penanganan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengobatan gratis masyarakat ber KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Pinjaman modal tanpa bunga maksimal 20 juta untuk UMKM	Program Pengembangan UMKM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Seragam sekolah gratis siswa baru SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru		
Bantuan Lansia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Beasiswa perguruan tinggi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi tidak mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Penataan sistem transportasi publik terintegrasi (pengembangan BRT dan pembangunan LRT)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Percepatan pembangunan jalan lingkar	Program Penyelenggaraan Jalan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan pusat seni budaya paguyuban se Kota Batam	Program Pengembangan Kebudayaan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Persampahan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Peningkatan investasi dan destinasi MICE	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sumber: RPJMD Kota Batam Tahun 2025

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Urusan	Kegiatan
Pendidikan	- Pembangunan ruang kelas baru SD berikut perabotnya - Peningkatan pembangunan infrastruktur dan ruang penunjang sekolah TK dan SD - Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SD - Pembangunan akses SD - Pembinaan O2SN dan FLS2N - Pengadaan alat media dan alat praga pendidikan - Rehabilitasi sedang/berat dan revitalisasi bangunan gedung/infrastruktur TK/SPK - Rehabilitasi sedang/berat revitalisasi bangunan gedung/infrastruktur SD - Peningkatan alat media penunjang pembelajaran SD - BOP sanggar kegiatan belajar - Pembangunan unit sekolah baru SMP - Pembangunan ruang kelas baru SMP berikut perabotnya - Peningkatan pembangunan infrastruktur dan ruang penunjang sekolah SMP - Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SMP - Pengadaan alat media dan alat praga pendidikan - Rehabilitasi sedang/berat revitalisasi bangunan gedung/infrastruktur SMP - Peningkatan alat media penunjang pembelajaran SMP - Olympiade sains SD/SMP - BOP sanggar kegiatan belajar (SKB) - Workshop pendidikan anak usia dini (PAUD) - Pembinaan pendidikan anak usia dini terintegrasi - Peningkatan sarana prasarana PAUD yang representative - Pembangunan unit sekolah baru TK/SPK - Pembinaan guru dan tenaga kependidikan SD/SMP - Pembinaan guru dan tendik PAUD dan dikmas - Pembinaan manajerial kepala sekolah, penilik dan pengawas sekolah - Peningkatan tata kelola rencana kerja sekolah dan rencana anggaran sekolah - Peningkatan pembinaan beasiswa prestasi dan beasiswa miskin pelajar
Kesehatan	- Peningkatan sumber daya manusia kesehatan - Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan - Pengadaan obat dan BMHP instalasi farmasi - Pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi pustu, polindes, posyandu dan rumah dinas - Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional - Akreditasi puskesmas - Peningkatan sarana puskesmas daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan - Peningkatan pra sarana puskesmas daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan - Pelayanan kesehatan penduduk miskin di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya

	- Pelaksanaan imunisasi dan surveilance - Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Pemberantasan dan pengendalian penyakit menular langsung - Bantuan operasional kesehatan instalasi farmasi - Perbaikan gizi masyarakat - Pengadaan obat dan bahan habis pakai RSUD Embung Fatimah - Peningkatan pelayanan BLUD RSUD Kota Batam
Pekerjaan Umum	- Pembangunan jalan Kota Batam - Pemerilahaaran rutin jalan Kota Batam - Peningkatan jalan wilayah I Kota Batam - Pemeliharaan berkala jalan Kota Batam - Pembangunan jembatan/pelantar beton Kota Batam - Penyusunan DED jalan Kota Batam - Pembangunan lampu pju wilayah I Kota Batam - Pemeliharaan lampu PJU Kota Batam - Penyusunan DED pembangunan lampu PJU Kota Batam - Pemeliharaan rutin alat berat - Peningkatan sarana dan prasarana pengujian - Operasional alat berat - Pembangunan drainase wil I Kota Batam - Pemeliharaan rutin drainase Kota Batam - Penyusunan DED drainase Kota Batam - Pembangunan pengaman tebing panta kota batam - Operasional UPT air bersih - Peningkatan dan pemeliharaan sarana air bersih - Penyusunan DED air bersih/air minum dan sanitasi - Peningkatan pelayanan UPT pengelolaan air bersih BLUD - Penyediaan air bersih/air minum wilayah hinterland Kota Batam - Pemasangan SR wilayah hinterland Kota Batam - Penyediaan sarana sanitasi/air limbah lingkungan Kota Batam - Rencana detail tata ruang Kota Batam - Pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota Batam - Penyusunan pedoman dan aplikasi pemanfaatan kawasan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	- Pembinaan jasa konstruksi - Pembangunan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan - Peningkatan kualitas perumahan swadaya - Pemeliharaan rusunawa - Pengendalian perumahan - Pendampingan PM-PIK dan pendampingan KOTAKU - Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan pemukiman perkotaan wilayah I - Perencanaan dan keterpaduan infrastruktur kawasan pemukiman - Peningkatan dan pengembangan nursery - Peningkatan dan penataan taman kota - Pemeliharaan taman jalan dan taman kota - Pengelolaan dan fasilitasi pengembangan kebun raya batam - Penataan lahan taman pemakaman - Penyusunan dokumen perencanaan pertamanan dan pemakaman Kota Batam
Keterntaman dan Ketertiban Umum	- Operasi yustisi terhadap peraturan daerah Kota Batam - Sosialisasi dan penyuluhan terhadap peraturan daerah Kota Batam - Pengawasan tempat hiburan malam selama bulan suci ramadhan - Pengawasan objek vital dan tempat strategis pemerintah Kota Batam - Pemantapan kinerja tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP - Pembinaan linmas dan peringatan HUT linmas - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran
Sosial	- Verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial - Kesiapsiagaan dan tanggap darurat korban bencana - Bimbingan terhadap organisasi sosial - Pendampingan pelaksanaan keluarga harapan - Bantuan pemulangan orang terlantar dan penanggungan korban tindak kekerasan - Pemakaman bagi orang tunawan - Pengendalian dan pengawasan PMKS - Pelayanan sosial penyandang disabilitas - Pelayanan sosial bagi anak dan lansia
Tenaga Kerja	- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja - Pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja - Pembinaan kelembagaan pelatihan kerja dan instruktur - Operasional kegiatan LKS tripartir dan bimtek LKS bipartite Kota Batam
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	- Pemberdayaan kesejahteraan keluarga - Pembinaan organisasi perempuan - Peningkatan peran stakeholder dalam kelembagaan PUG - Penyediaan dan pengembangan data gender dan anak

	- Konseling dan pendampingan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Pembentukan dan fasilitasi kelurahan layak anak Kota Batam
Pangan	- Pengembangan penganeekaragaman konsumsi - Pengembangan kawasan mandiri pangan dan penanganan kerawanan dan kemandirian pangan - Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan - Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
Pertanahan	- Pengadaan dokumen lahan asset pemerintah Kota Batam
Lingkungan Hidup	- Pelayanan pengangkutan sampah Kota Batam - Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan - Pemulihan lingkungan hidup - Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam - Operasional laboratorium lingkungan - Kajian lingkungan hidup - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pengelolaan persampahan melalui 3R - Operasional pelayanan sampah
Administrasi Kependudukan	- Pelayanan administrasi kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat - Penyelenggaraan diseminasi bagi masyarakat - Pembagian kelompok masyarakat pembangunan Kota Batam - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan public - Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan batu merah - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan batu merah - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan public - Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan lubuk baja kota - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan lubuk baja - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan public - Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sungai harapan - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan public - Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan mangsang

	- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan mangsang - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan public - Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sambau - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan bengkong laut - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan bengkong laut - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan kibing - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan bukit tempayan - Percepatan PSD lingkungan pemukiman wilayah kelurahan tanjung piayu - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sekanak raya - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sekanak raya - Pemberdayaan masyarakat di kelurahan bulang lintang - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan bulang lintang - Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah kelurahan rempang cate - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan galang baru
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Penyuluhan dan peningkatan pelayanan keluarga Berencana - Pemantapan revitalisasi program KB - Pembinaan pengembangan kelompok ketahanan keluarga, IPPKS dan PIK remaja - Operasional balai penyuluhan keluarga berencana - Pembinaan program KKDPK, distribusi alkon dan manajemen BOKB - Penggerakan kampung KB
Perhubungan	- Pelaksanaan operasi/razia gabungan kendaraan bermotor - Pengelolaan parker umum Kota Batam - Operasional dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor - Operasional pelayanan jasa transportasi bus transbatam - Operasional pelayanan jasa transportasi (BLUD) - Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas - Rehabilitasi dan pemerilahaan sarana dan prasarana perhubungan laut - Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas - Pembangunan dan peningkatan ATCS Kota Batam - Pembangunan sarana dan prasarana angkutan jalan - Rehabilitasi dan pemelirahaan sarana dan prasarana angkutan jalan - Pembangunan pelabuhan laut - Pembangunan dermaga rakyat

Komunikasi dan Informatika	- Publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah - Fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan komunikasi - Pengelolaan informasi dokumentasi - Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data - Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Penata kelembagaan dan usaha koperasi - Fasilitas promosi bagi koperasi dan usaha mikro - Pelatihan kompetensi manajemen keuangan KSP/USP - Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah
Penanaman Modal	- Promosi penanaman modal - Perencanaan, pengembangan penanaman modal daerah - Pelayanan data dan informasi investasi - Penyelenggaraan perizinan pembangunan bidang ekonomi dan social - Pengendalian penanaman modal - Kerjasama pembangunan antar pemerintah - Perumusan kebijakan pengendalian inflasi - Sinkronisasi dan sinergitas tanggungjawab social Kota Batam dan pemerintah Kota Batam
Kepemudaan dan Olahraga	- Penyelenggaraan paskibraka - Bulan bakti pemuda - Pelaksanaan event olahraga tingkat Kota Batam - Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga - Diklat kepramukaan
Statistik	- Penyediaan Data Statistik Sektorial Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM
Kebudayaan	- Penyelenggaraan festival budaya daerah - Pengembangan dan pembinaan terhadap pelaku seni budaya - Pelestarian cagar budaya, sejarah dan pemusiuman Kota Batam - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Perpustakaan	- Lomba minat baca melalui mendongeng, pidato dan cerdas cermat - Bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan - Operasional perpustakaan keliling Kota Batam - Pengadaan buku perpustakaan umum - Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Kearsipan	- Penelusuran arsip bernilai guna dan akuisisi arsip - Bimbingan teknis kearsipan - Pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Kelautan dan Perikanan	- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap

	- Pengembangan sarana usaha perikanan budidaya - Diversifikasi promosi dan pameran produk hasil ikan
Pariwisata	- Peningkatan pengelolaan dan fasilitasi even kuliner nusantara - Pelaksanaan promosi didalam dan luar negeri - Pengembangan aktualisasi minat dan bakat marching band Kota Batam - Peningkatan penyelenggaraan event kepariwisataan Kota Batam - Pembinaan pelaku ekonomi kreatif berbasis media dan iptek - Pembinaan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
Pertanian	- Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian - Peningkatan produksi, mutu bibit pakan ternak Kota Batam - Peningkatan pengolahan pemasaran dan perlindungan produk hasil peternakan - Peningkatan, pencegahan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan sector peternakan - Penguatan kelembagaan pertanian - Pengelolaan UPTD rumah potong hewan dan rumah potong unggas - Pengelolaan UPTD pusat kesehatan hewan
Perdagangan	- Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian Kota Batam - Pembinaan dan pengawasan potensi UTTP dan BDKT di Kota Batam - Pelatihan ekspor dan akses pasar untuk IKM berpotensi ekspor - Operasi pasar kebutuhan pokok bazar sembako murah pemerintah Kota Batam - Peningkatan sarana dan prasaran pasar
Perindustrian	- Operasional dewan kerajinan nasional Kota Batam
Perencanaan Pembangunan	- Penyusunan RKPD Kota Batam - Evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Batam - Penyusunan RPJMD Kota Batam - Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Batam - Penyelenggaraan musrembang RKPD - Peningkatan kapasitas perencana dan perencanaan berbasis aplikasi/system - Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah - Pembinaan dan peningkatan kemampuan dibidang PBJ - Penyusunan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan kegiatan APBD Kota Batam - Penyusunan renstra dan renja setdako batam - Penyusunan laporan keuangan/barang sekda - Monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasasn

	- Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi, dan Lingkungan Hidup - Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD dan BLUD, Koperasi dan UMKM - Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
Keuangan	- Penyusunan APBD Kota Batam - Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Pandapatan Asli Daerah - Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam - Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa - Pengamanan Aset Daerah Kota Batam - Pedoman Petunjuk Penyusunan APBD - Penyusunan KUAPPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan - Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam - Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Sosialisasi Pajak Daerah - Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah - Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan - Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak - Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2
Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Analisa Potensi Unggulan Kota Batam - Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	- Pengelolaan Mutasi ASN - Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam - Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan - Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional - Pemberian Bantuan Tugas Belajar
Kesatuan Bangsa dan Politik	- Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol - Pendidikan Budaya Politik - Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam - Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam - Sosialisasi Undang-Undang Ormas - Tim Pemantauan Orang Asing (POA) - Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan
Penyusunan kebijakan, pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administratif	- Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

	- Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) - Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam - Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan - Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam - Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemko Batam
Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	- Pembahasan Rancangan KUA PPAS - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Penyediaan Kebutuhan Alat Kekengkapan DPRD - Penyediaan Kebutuhan Reses - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi - Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi - Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD - Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah - Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD - Pelayanan Kehumasan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu - Pelaksanaan revidi di lingkungan Pemko Batam - Monitoring dan Evaluasi SPIP - Operasional Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Batam - Evaluasi SAKIP OPD - Peningkatan Kompetensi APIP - Survei Penilaian Integritas - Monitoring dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal) - Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam

Sumber: RKPD Kota Batam Tahun 2025

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Batam merupakan manifestasi dari komitmen Pemerintah Kota untuk menjamin hak-hak konstitusional warga melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Sebagai kota industri dan gerbang internasional, Batam menghadapi tantangan unik dalam mensinkronkan pertumbuhan populasi yang cepat dengan ketersediaan infrastruktur sosial dan fisik.

Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor pelayanan dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan pemenuhan, dan pelaksanaan pelayanan dasar.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal Bencana Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal Kebakaran.
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial.

A. Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan fondasi krusial yang melibatkan identifikasi sasaran atau by name by address untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Di Kota Batam, narasi pengumpulan data dilakukan melalui integrasi data sektoral dengan basis data kependudukan.

Berdasarkan metodologi penerapan SPM yang selaras dengan RPJMD Kota Batam 2025-2029, tahap pengumpulan data tidak lagi sekadar menghitung jumlah jiwa, tetapi harus berbasis spasial (lokasi) dan kondisi riil di lapangan. Berikut adalah cakupan data spesifik yang diperlukan untuk melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar di Kota Batam berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029:

1. Urusan Pendidikan

- a. Data Demografi Pendidikan: Jumlah anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SMP) per Kelurahan, termasuk data anak putus sekolah.
- b. Data Sarana Prasarana: Jumlah ruang kelas layak, jumlah laboratorium komputer, dan ketersediaan jaringan internet (Wi-Fi) di sekolah hinterland.
- c. Data Pendidik: Rasio guru terhadap siswa dan jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai mata pelajaran.

2. Urusan Kesehatan

- a. Data Ibu & Anak: Jumlah ibu hamil (risiko tinggi/normal), jumlah bayi baru lahir, dan data tinggi/berat badan balita (untuk deteksi stunting).
- b. Data Penyakit Menular & Tidak Menular: Jumlah penderita TB, HIV/AIDS, serta warga usia 15-59 tahun yang menderita Hipertensi dan Diabetes Melitus.
- c. Data Logistik: Ketersediaan stok obat esensial dan kondisi fungsional alat kesehatan (USG, antropometri, dll).

3. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Data Akses Air Minum: Jumlah Rumah Tangga (RT) yang sudah teraliri pipa SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan yang masih bergantung pada sumur/hujan.
- b. Data Sanitasi: Jumlah rumah yang memiliki tangki septik sesuai standar SNI dan peta sebaran titik banjir/genangan air di wilayah perkotaan (Mainland).
- c. Data Infrastruktur: Panjang jalan lingkungan dan kondisi drainase primer/sekunder.

4. Urusan Perumahan Rakyat

- a. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Kriteria kerusakan komponen bangunan (atap, lantai, dinding) dan ketersediaan pencahayaan/ventilasi.
- b. Data Kawasan Kumuh: Luas deliniasi kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Batam.
- c. Data Backlog Perumahan: Jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri atau masih menumpang/menyewa.

5. Urusan Trantibumlinmas

- a. Data Kerawanan Bencana: Peta zona rawan puting beliung, banjir rob di pesisir, dan area rawan kebakaran hutan/lahan (Karhutla).
- b. Data Proteksi Kebakaran: Lokasi hidran kota yang berfungsi, jumlah gedung tinggi (high-rise) yang wajib audit sistem proteksi kebakaran.
- c. Data Sarpras Darurat: Kondisi armada pemadam, jumlah personel terlatih, dan ketersediaan peralatan evakuasi (perahu karet, tenda darurat).

6. Urusan Sosial

- a. Data Disabilitas & Lansia: Jumlah penyandang disabilitas (fisik/mental) terlantar dan lansia di atas 60 tahun yang tidak memiliki pendukung ekonomi.
- b. Data PMKS Lainnya: Jumlah anak terlantar, gelandangan, pengemis, serta korban kekerasan atau bencana sosial.
- c. Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial): Data kemiskinan ekstrem yang sudah terverifikasi dan tervalidasi (cleansing data).

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis gap untuk menentukan selisih antara kondisi eksisting dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. Narasi penghitungan ini mengonversi angka populasi menjadi kebutuhan riil sumber daya. Berikut adalah kesimpulan hasil penghitungan yang menjadi dasar intervensi kebijakan untuk tiap-tiap urusan:

1. Bidang Pendidikan

Diperlukan penambahan rata-rata 15-20 Unit Sekolah Baru (USB) dan rehabilitasi berat untuk 150-200 Ruang Kelas Baru (RKB) guna menghapuskan sistem belajar double shift (masuk siang). Selain itu, terdapat kebutuhan pengadaan perangkat TIK untuk rasio 1 komputer per 15 siswa di seluruh sekolah negeri.

2. Bidang Kesehatan

Dibutuhkan peningkatan kapasitas tempat tidur (BOR) rumah sakit daerah minimal 15% dari kondisi saat ini dan pengadaan alat antropometri standar nasional untuk 500+ titik Posyandu di Batam guna mengejar target Zero Stunting.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Terdapat kebutuhan pembangunan jaringan pipa distribusi baru sepanjang kurang lebih 50-80 km untuk menjangkau area permukiman baru dan pulau penyangga. Juga diperlukan normalisasi drainase sepanjang 12-15 titik rawan banjir utama untuk meningkatkan kapasitas tampung air hujan.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Teridentifikasi sekitar 2.500-3.000 unit rumah di kantong-kantong kemiskinan (seperti wilayah pesisir/hinterland) yang masuk kategori tidak layak huni dan memerlukan intervensi renovasi atau relokasi ke Rusunawa.

5. Bidang Trantibumlinmas

Kota Batam memerlukan tambahan minimal 5 unit pos pemadam kebakaran baru (khususnya di wilayah Batam Center dan Sekupang) serta pengadaan minimal 2 unit kendaraan Bronto Skylift untuk mitigasi kebakaran pada bangunan bertingkat tinggi (high-rise building).

6. Bidang Sosial

Diperlukan peningkatan anggaran bantuan sosial tunai/nontunai bagi sekitar 40.000 - 50.000 jiwa kelompok rentan (lansia dan disabilitas) serta

pembangunan 1 Pusat Rehabilitasi Sosial Terpadu yang mampu menampung minimal 200 klien per periode rehabilitasi.

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa beban pelayanan di Batam sangat dipengaruhi oleh konsentrasi penduduk di wilayah Mainland. Oleh karena itu, strategi RPJMD 2025-2029 akan lebih menekankan pada efisiensi ruang melalui pembangunan vertikal (seperti Rusunawa) dan optimalisasi teknologi informasi untuk memangkas jarak birokrasi layanan kesehatan dan pendidikan.

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Setelah mengetahui kebutuhan di masing-masing sektor, pemerintah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar:

Tabel 1.8 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar selaras dengan Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029

Urusan SPM	Arah Kebijakan RPJMD	Program Kerja Strategis	Target
Pendidikan	Digitalisasi pendidikan dan pemerataan akses di Hinterland.	Pembangunan Smart School (Laboratorium Digital); Beasiswa Batam Cerdas; Pembangunan Sekolah Terpadu di wilayah pesisir.	100% Digital Literasi & APK
Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) & Transformasi Layanan Primer.	Revitalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Plus; Percepatan penurunan Stunting (Zero Stunting 2029); Layanan Home Care lansia.	100% Standar Teknis Alkes
Pekerjaan Umum	Ketahanan air baku dan pengendalian banjir perkotaan.	Normalisasi drainase induk; Pembangunan bendungan/waduk baru; Penguatan tanggul rob di pemukiman pesisir.	0% Kawasan Titik Banjir
Perumahan Rakyat	Penataan kawasan kumuh menjadi hunian layak dan estetis.	Program Bedah Rumah (RTLH); Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) baru; Sertifikasi aset tanah pemukiman.	100% Hunian Layak Sanitasi

Trantibum	Modernisasi mitigasi bencana dan keamanan kota (Safe City).	Pengadaan CCTV terintegrasi (AI) untuk kamtibmas; Penambahan armada Damkar High-Reach; Pembentukan Forum Relawan Bencana di tiap Kelurahan.	< 10 Menit Respon Darurat
Sosial	Perlindungan sosial adaptif dan inklusivitas	Pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial Terpadu; Digitalisasi Basis Data Terpadu (DTKS); Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.	100% Penanganan PMKS

Sumber: RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Dalam rencana 2025-2029 ini, terdapat penekanan kuat pada Kemandirian Anggaran. Pemerintah Kota Batam diarahkan untuk tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mengoptimalkan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) terutama untuk sektor Pekerjaan Umum (Air Minum) dan Perumahan Rakyat.

Fokus tahun 2025-2026 adalah pemulihan pasca-transisi kepemimpinan daerah dengan penguatan fondasi infrastruktur digital di seluruh titik pelayanan dasar. Selain itu, sinkronisasi antara BP Batam dan Pemko Batam menjadi kunci utama agar pembangunan infrastruktur dasar tidak tumpang tindih dengan pengembangan kawasan industri/investasi.

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap terakhir adalah pelaksanaan program pemenuhan pelayanan dasar yang dilakukan secara terintegrasi oleh dinas terkait dengan dukungan pemerintah pusat dan masyarakat.

Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar di enam bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial. Pada tahun 2025, pelaksanaan program pemenuhan pelayanan dasar dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	83,32	83,8	0,58
2	Presentase Penduduk Miskin	4,85	3,81	-21,44
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	50,431	49,931	-0,99
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,69	6,76	1,05
5	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	182,51	195,56	7,15
6	Ketimpangan Pendapatan	0,348	0,386	10,92

Sumber: SILPPD Kemendagri Tahun 2025

Secara keseluruhan, Kota Batam menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat progresif. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 6,69% pada 2024 menjadi 6,76% pada 2025 menunjukkan efektivitas investasi dan aktivitas industri yang melampaui rata-rata nasional. Lonjakan signifikan pada PDRB Per Kapita (naik 7,15%) mengonfirmasi bahwa produktivitas ekonomi per individu semakin kuat, yang didukung oleh realisasi investasi besar di sektor manufaktur dan jasa. Keberhasilan ekonomi ini berbanding lurus dengan penurunan tajam pada Persentase Penduduk Miskin sebesar -21,44% (turun dari 4,85% menjadi 3,81%). Angka ini merupakan salah satu pencapaian penurunan kemiskinan terdalam di Provinsi Kepulauan Riau, yang menandakan program pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja berjalan cukup efektif.

Namun, di balik pertumbuhan yang masif tersebut, terdapat tantangan struktural pada aspek pemerataan dan ketenagakerjaan. Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) justru mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,92% (dari 0,348 menjadi 0,386). Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi kue ekonomi cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi atau sektor padat modal. Meskipun jumlah pengangguran terbuka secara nominal menurun tipis (-0,99%), angka pengangguran di Batam masih tergolong tinggi jika dibandingkan daerah lain di Kepri. Hal ini disebabkan oleh fenomena "magnet pencari kerja", di mana daya tarik investasi Batam memicu arus migrasi penduduk masuk yang lebih

cepat daripada kemampuan pasar kerja lokal dalam menyerap tenaga kerja tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Batam pada tahun 2025 berada pada fase ekspansi yang kuat dan berkualitas tinggi dari sisi pembangunan manusia (IPM 83,8 termasuk kategori Sangat Tinggi). Pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 6,7% berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis hingga menyentuh angka 3,81%. Meski demikian, peningkatan ketimpangan (Gini Ratio) menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada kebijakan ekonomi inklusif agar pertumbuhan yang tinggi tidak hanya memperlebar jarak antara kelompok kaya dan miskin.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap adalah sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	69.20	Dinas Pendidikan	
2		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.62		
3		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98.68		
4		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	65.43		
5		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	63.85		
6	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0.15	Dinas Kesehatan	
7		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	81.44		
8		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100.00		
9		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100.00		
10		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	92.68		
11		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1.38		
13		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	90.21		
14		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	87.78		
15		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	90.71		
16		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80.11		
17		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	98.86		
18		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	81.03		
19		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	59.44		
20	Pekerjaan Umum	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	100.00	Dinas BMSDA	
21		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	90.64	Dinas CKTR	
22		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	89.57	Dinas BMSDA	
23		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	100.00	Dinas CKTR	
24		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100.00	Dinas CKTR	
25		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	5.04	Dinas BMSDA	
26		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100.00	Dinas BMSDA	
27		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	97.10	Dinas CKTR	
28		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100.00	Dinas CKTR	
29		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	98.75	Dinas BMSDA	
30	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100.00	Dinas Perkim	
31		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	73.18		
32		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100.00		
33		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33.33	BPBD	
35		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	Satpol PP	
36		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100.00		
37		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
38		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00		
39		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	99.12		
40	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	59.50	Dinas Sosial	
41		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51.88		
42		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	65.79		
43		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	85.27		
44		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100.00		
45		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	20.19		
46	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100.00	Dinas Tenaga Kerja	
47		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	43.32		
48		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100.00		
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100.00	Dinas P3AP2KB	
50		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100.00		
51	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52.39	Dinas Ketapang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	24.85	Dinas Pertanahan	
53		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0.61		
54		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalakan	42.77		
55	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	77.57	Dinas Lingkungan hidup	
56		Persentase jumlah sampah yang tertangani	80.65		
57	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	98.20	Disdukcapil	
58		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	63.35		
59		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100.00		
60		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99.19		
61		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100.00		
62		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100.00		
63		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100.00		
64	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100.00		
65		Persentase peningkatan status desa mandiri	100.00		
66		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100.00		
67	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	100.00	Dinas P3AP2KB	
68		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	68.77		
69		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	40.00		
70	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0.83	Dinas Perhubungan	
71		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.56		
72		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100.00		
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	60.00	Dinas Kominfo	
74		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78.57		
75		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	81.55		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
76	Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	61.19	Dinas Koperasi dan UKM	
77		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	73.45		
78	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	73.57	DPM-PTSP	
79		Realisasi total terhadap target investasi	118.20		
80	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	114.17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
81		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	24.65		
82		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	47.83		
83		Persentase jumlah atlet berprestasi	41.84		
84	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	85.03	Dinas Kominfo	
85	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	80.17	Dinas Kominfo	
86	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	65.52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
87		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-25.07		
88	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	61.13	Dinas Pusip	
89		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12.36		
90	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	97.08	Dinas Pusip	
91	Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	395.96	Dinas Perikanan	
92		Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	33.26		
93	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0.89	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
94		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	21.58		
95		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	17.40		
96	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	5.40	Dinas Ketapang	
97		Peningkatan produksi hortikultura	-4.11		
98		Peningkatan produksi komoditas peternakan	12.71		
99		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	82.24		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95.45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
101	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	24.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
102		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	44.29		
103		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	6.06		
104		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	97.32		

Sumber: SILPPD Kemendagri Tahun 2025

Secara umum, capaian IKK urusan pemerintahan menunjukkan performa yang sangat kuat dalam sektor pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari pencapaian 100% pada pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, gangguan jiwa berat, dan risiko HIV. Efektivitas birokrasi juga tercermin pada sektor administrasi kependudukan, di mana penerbitan akta kematian, perkawinan, dan perceraian bagi pelapor mencapai angka sempurna (100%), serta cakupan akta kelahiran yang sudah sangat tinggi di angka 98,20%. Selain itu, sektor pendidikan dasar dan kesetaraan telah menunjukkan inklusivitas yang baik dengan tingkat partisipasi di atas 98%.

Meskipun pelayanan administratif unggul, terdapat tantangan signifikan pada kualitas infrastruktur fisik dan pengelolaan ruang. Persentase ruang kelas dan toilet sekolah dalam kondisi baik masih tertahan di angka 63-65%. Yang lebih krusial, perlindungan kawasan permukiman rawan banjir baru mencapai 5,04%, dan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sangat rendah, yaitu hanya 0,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan fisik dan penataan ruang belum berjalan selaras dengan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Di sektor ekonomi, terdapat anomali yang menarik antara investasi dan pertumbuhan sektor spesifik. Realisasi total investasi melampaui target hingga 118,20%, yang menunjukkan daya tarik wilayah yang tinggi bagi investor. Namun, pertumbuhan jumlah wisatawan asing dan nusantara masih berada di kisaran 17-21%, dan sektor hortikultura justru mengalami kontraksi sebesar -4,11%. Sektor perikanan menjadi primadona dengan

capaian produksi mencapai 395,96%, menandakan potensi maritim yang berhasil dioptimalkan secara masif.

Aspek sosial dan pemberdayaan masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait literasi dan peran pemuda. Meskipun tingkat kegemaran membaca berada di angka 61,13, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sangat rendah, yaitu hanya 12,36. Selain itu, terdapat ketimpangan partisipasi pemuda; sementara mereka sangat aktif dalam ekonomi mandiri (114,17%), keterlibatan mereka dalam organisasi kepemudaan dan sosial sangat minim, yakni hanya 24,65%. Hal ini menunjukkan kecenderungan pemuda yang lebih berorientasi pada kemandirian ekonomi dibandingkan aktivisme sosial.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.a.1	Bidang Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100.00	BPKAD	
4.b.1	Bidang Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	37.66	BPKAD	
4.b.2		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	54.36		
4.b.3		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	57.66		
4.b.4		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	34.69		
4.c	Bidang Kelembagaan, Kepegawaian dan Diklat	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	54.50	BKPSDM	
4.d	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	87.88	BRIDA	
4.e.1	Bidang Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.643	Inspektorat	
4.e.2		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	2.37		
4.e.3		Manajemen risiko Indeks	2.498		
4.e.4		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100.00		
4.f.1	Bidang Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	BPBJ Setdako	
4.f.2		Pemanfaatan sistem pengadaan	27.05		
4.f.3		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia	21.75		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)			
4.g.1	Bidang Hubungan dan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1	Bagian Hukum Setdako	
4.g.2		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	75.00		
4.h	Bidang Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	73.08	Bagian Organisasi Setdako	

Sumber: SILPPD Kemendagri Tahun 2025

Secara umum, tata kelola keuangan dan perencanaan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, terlihat dari Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan APBD serta Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK yang keduanya mencapai angka sempurna 100%. Hal ini mengindikasikan adanya sinkronisasi kebijakan yang matang dan kepatuhan regulasi yang kuat. Dari sisi kemandirian fiskal, daerah memiliki struktur pendapatan yang cukup sehat dengan Persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 54,36%. Selain itu, komitmen terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur terlihat dominan, di mana alokasi belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 57,66% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 34,69%.

Namun, terdapat ruang peningkatan yang signifikan pada sektor pengadaan barang dan jasa serta sistem pengendalian internal. Meskipun aspek inovasi perangkat daerah sudah cukup baik di angka 87,88%, nilai Maturitas SPIP (2,643), Kapabilitas APIP (2,37), dan Manajemen Risiko (2,498) masih berada pada level moderat yang memerlukan penguatan sistematis. Begitu pula pada aspek UKPBJ, di mana Pemanfaatan sistem pengadaan baru mencapai 27,05 poin dan Kualifikasi SDM PBJ berada di angka 21,75 poin, yang menunjukkan perlunya akselerasi digitalisasi dan peningkatan kompetensi personil. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Penilaian maladministrasi berada pada angka 73,08, menunjukkan kinerja yang cukup baik namun tetap memerlukan mitigasi terhadap potensi penyimpangan prosedur.

Keseluruhan data menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki stabilitas perencanaan dan kepatuhan anggaran yang sangat baik, didukung oleh kemandirian fiskal yang memadai dan alokasi belanja yang berorientasi pada publik. Tantangan utama terletak pada penguatan kualitas tata kelola internal (SPIP/APIP) dan modernisasi pengadaan barang/jasa, yang jika ditingkatkan, akan secara signifikan mendorong efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik ke level yang lebih tinggi.

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, telah menuangkan sasaran

strategis yang ditetapkan beserta indikator ketercapaian dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berikut merupakan PK Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2025

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	1	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan kecil pada level Kabupaten/kota	95,5
2	Meningkatnya sektor kepariwisataan daerah	2	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap produk domestik regional bruto	2,56
3	Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	3	Pertumbuhan realisasi Investasi	5,00
4	Meningkatnya sektor perdagangan di Kota Batam	4	Tingkat inflasi daerah	2,5
5	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar	5	Rasio konektivitas	0,811
		6	Persentase Pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum	63,61
		7	Persentase Pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum permukiman perkotaan	85,19
6	Menurunnya ketimpangan pendapatan	8	Rasio gini	0,334
7	Masyarakat meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	9	Tingkat pengangguran terbuka	7,19
8	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	10	Indeks Harmoni	84,32
9	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	11	Indeks pendidikan	75,16
		12	Indeks Kesehatan	85
10	Meningkatkan pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	4,25
11	Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	14	Nilai SAKIP	70,3
12	Meningkatkan akuntabilitas, keuangan daerah	15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET
13	Peningkatan Pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	16	Nilai survei penilaian integritas (SPI)	72,70
14	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	17	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,74
15	Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	18	Indeks resiko bencana	101,89
16	Pemenuhan pembangunan sosial budaya dan keagamaan	19	Tingkat pelestarian kebudayaan	19,05

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan kecil pada level kabupaten/kota	Persen	95,5	37,88	96,44
2	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap produk domestik regional bruto	Rasio	2,56	1,92	75
3	Pertumbuhan realisasi Investasi	Persen	5,00	5,87	117,40
4	Tingkat inflasi daerah	Persen	2,5	2,78	89,93
5	Rasio konektivitas	Rasio	0,811	0,805	99,26
6	Persentase Pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum	Persen	63,61	114,17	179,48
7	Persentase Pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum permukiman perkotaan	Persen	85,19	51,03	59,90

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
8	Rasio gini	Rasio	0,334	0,338	98,82
9	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,19	7,67	93,74
10	Indeks harmoni	Nilai	84,32	7,07	8,38
11	Indeks pendidikan	Persen	75,16	75,49	100,44
12	Indeks Kesehatan	Nilai	85	85,45	100,53
13	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,25	4,69	110,35
14	Nilai SAKIP	Nilai	70,3	68,98	98,12
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,3	82,96	105,95
16	Nilai survei penilaian integritas (SPI)	Indeks	72,70	73,36	100,91
17	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	68,74	65,55	95,36
18	Indeks resiko bencana	Nilai	101,89	108,89	93,57
19	Tingkat pelestarian kebudayaan	Persen	19,05	21,43	112,49

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

Berdasarkan data capaian indikator sasaran tahun 2025 tersebut, secara umum kinerja pembangunan menunjukkan hasil yang positif dengan mayoritas indikator berhasil melampaui atau mendekati target yang ditetapkan. Keberhasilan signifikan terlihat pada sektor infrastruktur pekerjaan umum yang mencapai 179,48% , pertumbuhan realisasi investasi sebesar 117,40% , serta pelestarian kebudayaan sebesar 112,49%. Sektor pelayanan publik, tata kelola keuangan, dan pendidikan juga mencatatkan capaian di atas 100%. Namun, terdapat beberapa catatan kritis pada indikator dengan capaian yang sangat rendah, terutama Indeks Harmoni yang hanya mencapai 8,38% dan pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan sebesar 59,90%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini masih belum memenuhi target optimal, yang mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut pada aspek pemerataan kesejahteraan dan harmonisasi sosial di masa mendatang.

- c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya
- Pengukuran capaian kinerja tidak dapat dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025, hal ini dikarenakan target kinerja tahun 2024 berbeda dengan target kinerja tahun 2025.

Gambar 2.1 Tabel Target Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Tahun 2025

Tahun 2024				Tahun 2025					
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Target	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Perencanaan Kota Batam Berbasis Sektor Pendidikan, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing	1	Perubahan Ekonomi Daerah	8,80%	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan perikanan daerah	1	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan kecil pada level kabupaten/kota	85,5
2	Meningkatkan Perencanaan Kota Batam Yang Melaya Dari Industri	2	Indeks Gini	0,320	2	Meningkatnya sektor kapabilitas daerah	2	Rasio PDRI Persebaran ekonomis makro dan mikro terhadap produk domestik regional bruto	2,08
3	Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Berkualitas Dan Sesuai Dengan Tata Ruang Kota Batam Serta Berwawasan Lingkungan	3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	73,40	3	Meningkatnya investasi dalam kawasan pertumbuhan ekonomi	3	Perubahan nilai investasi	6
					4	Meningkatnya sektor perdagangan di Kota Batam	4	Tingkat inflasi daerah	2,5
4	Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera	4	Indeks Pembangunan Manusia	82,75	5	Meningkatnya kualitas kompetensi, produktivitas, dan pemerataan infrastruktur dasar	5	Rasio konektivitas	0,811
5	Persebaran Penduduk Malar	4,88%	6	Persebaran Pemerataan infrastruktur kawasan urban			83,81		
5	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Berperan Aktif Dalam Mendukung	6	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	88,80			7	Persebaran Pemerataan infrastruktur kawasan urban	85,18
6	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Berperan Aktif Dalam Mendukung	7	Indeks Reformasi Birokrasi	76			8	Rasio gini	0,334
					7	Meningkatnya kualitas kompetensi, produktivitas, dan pemerataan infrastruktur dasar	9	Tingkat pengangguran terbuka	7,18
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8	Perubahan Realisasi Investasi Daerah	11,81	8	Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat	10	Indeks hamari	84,32
8	Meningkatnya Pengaruh Gender Dan Peran Dalam Pembangunan	9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,75	9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan	11	Indeks pendidikan	75,16
9	Menurunkan Angka Pengangguran	10	Tingkat pengangguran terbuka	8,54	10	Meningkatnya pelayanan publik	12	Indeks Penguasaan Publik	3,16
					11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	14	Nilai SAKIP	70,3
10	Terwujudnya Ketidapekaan Dan Ketakutakutan Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Berkualitas	11	Open SPK	WTP	12	Meningkatkan akuntabilitas, keuangan daerah	15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,3
		12	Nilai LHPD	Sangat Tinggi	13	Meningkatnya pengendalian tata kelola keuangan daerah dan pengapalan (tata kelola)	16	Nilai survei penilaian integritas (SPI)	72,70
		14	Meningkatnya pengendalian sumber daya dan secara efisien dan bertanggung jawab serta pelayanan lingkungan	17	Indeks kualitas lingkungan hidup	88,74			
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	13	Indeks SPBE	3,77	15	Peningkatan ketanggapan dan tanggap bencana wilayah	18	Indeks index bencana	101,88
					16	Pemerintah pembangunan sosial budaya dan keagamaan	19	Tingkat pelayanan ketidupekaan	19,20

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

Secara teknis, perbandingan capaian kinerja Pemerintah Kota Batam antara tahun 2025 dan 2024 tidak dapat dilakukan secara *apple-to-apple* karena adanya diskontinuitas instrumen perencanaan. Tahun 2025 menandai transisi ke periode RPJMD 2025–2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kota Batam 2025-2029, yang membawa perubahan fundamental pada visi, misi, serta struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan ini, yang diperkuat dengan penyesuaian regulasi tata kelola kinerja ASN melalui Permenpan RB No. 1/2023 dan standar pelayanan minimal yang baru, menciptakan "patahan data". Akibatnya, basis perhitungan dan target capaian di tahun 2025 memiliki parameter yang berbeda secara metodologis, sehingga perbandingan angka secara linear akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak valid secara regulasi.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Target Pada RPJMD 2029 (%)	Capaian (%)
Proporsi jumlah industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dan kecil pada level kabupaten/kota	96,44	39,66	95,51
Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap produk domestik regional bruto	75,00	3,21	59,81
Pertumbuhan realisasi Investasi	117,40	5,00	117,4
Tingkat inflasi daerah	89,93	3,5	125,90
Rasio konektivitas	99,26	0,86	93,60
Persentase Pemenuhan infrastruktur perkotaan	179,48	77,36	168,52
Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	59,90	90,16	56,60
Rasio gini	98,82	0,326	96,44
Tingkat pengangguran terbuka	93,74	6,98	91,00
Indeks harmoni	8,38	85,79	8,24
Indeks pendidikan	100,44	77,46	102,61
Indeks Kesehatan	100,53	86,68	98,58
Indeks Pelayanan Publik	110,35	4,50	104,22
Nilai SAKIP	98,12	78,3	88,10
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	105,95	78,8	94,98
Nilai survei penilaian integritas (SPI)	100,91	77,9	106,19
Indeks kualitas lingkungan hidup	95,36	69,78	106,45
Indeks resiko bencana	93,57	98,11	90,10
Tingkat pelestarian kebudayaan	112,49	84,52	25,35

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

Berdasarkan data laporan capaian kinerja tahun 2025, terlihat sebuah gambaran komprehensif mengenai progres pembangunan daerah yang

didominasi oleh keberhasilan signifikan di sektor infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Persentase pemenuhan infrastruktur perkotaan menjadi capaian yang paling mencolok dengan angka mencapai 179,48%, yang menunjukkan akselerasi pembangunan fisik jauh melampaui target tahunan yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga sejalan dengan pertumbuhan realisasi investasi yang mencapai 117,40% serta indeks pelayanan publik sebesar 110,35%, mengindikasikan bahwa iklim investasi dan kualitas birokrasi berada pada jalur yang sangat positif. Selain itu, sektor pengelolaan keuangan dan integritas juga menunjukkan performa solid dengan indeks masing-masing sebesar 105,95% dan 100,91%, yang memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang tinggi tersebut, terdapat beberapa indikator strategis yang masih memerlukan perhatian khusus dan intervensi kebijakan yang lebih mendalam. Sektor perumahan dan kawasan permukiman mencatatkan capaian terendah, yakni hanya sebesar 59,90%, yang menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Begitu pula dengan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum yang baru mencapai 75,00%, mengindikasikan bahwa sektor pariwisata atau konsumsi jasa belum pulih atau tumbuh seoptimal sektor lainnya. Meskipun indikator dasar seperti indeks pendidikan (100,44%) dan kesehatan (100,53%) telah memenuhi target, angka tingkat pengangguran terbuka yang berada di posisi 93,74% serta tingkat inflasi daerah sebesar 89,93% memberikan sinyal bahwa stabilitas ekonomi makro dan penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan besar menuju target RPJMD tahun 2029.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2.4 Rincian Dukungan Anggaran

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah, koperasi, usaha mikro dalam perekonomian daerah	1	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah, operasi, usaha mikro dan kecil pada level kabupaten/kota	95,5	Rp.14,413,028,370.00
2	Meningkatnya sektor kepariwisataan daerah	2	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap produk domestik regional bruto	2,56	Rp.9,121,479,450.00
3	Meningkatnya investasi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi	3	Pertumbuhan realisasi Investasi	5,00	Rp.1,785,988,000.00
4	Meningkatnya sektor perdagangan di Kota Batam	4	Tingkat inflasi daerah	2,5	Rp.7,999,085,400.00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	ANGGARAN
5	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar	5	Rasio konektivitas	0,811	Rp.214,490,371,026.00
		6	Persentase Pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum	63,61	Rp.177,358,166,071.00
		7	Persentase Pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum permukiman perkotaan	85,19	Rp.104,743,116,458.00
6	Menurunnya ketimpangan pendapatan	8	Rasio gini	0,334	Rp.55,391,034,395.00
7	Masyarakat meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berkualitas	9	Tingkat pengangguran terbuka	7,19	Rp.43,443,330,496.00
8	Meningkatnya keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat	10	Indeks Harmoni	84,32	Rp.65,413,022,089.00
9	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan	11	Indeks pendidikan	75,16	Rp.535,646,254,249.00
		12	Indeks Kesehatan	85	Rp.162,950,348,460.00
10	Meningkatkan pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	4,25	Rp.233,863,628,956.00
11	Meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah	14	Nilai SAKIP	70,3	Rp.10,175,659,798.00
12	Meningkatkan akuntabilitas, keuangan daerah	15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78,3	Rp.43,648,058,264.00
13	Peningkatan Pengawasan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan tindak korupsi	16	Nilai survei penilaian integritas (SPI)	72,70	Rp.1,415,467,200.00
14	Meningkatnya penggunaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab serta pelestarian lingkungan	17	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,74	Rp.138,894,998,001.00
15	Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	18	Indeks resiko bencana	101,89	Rp.1,165,777,100.00
16	Pemenuhan pembangunan sosial budaya dan keagamaan	19	Tingkat pelestarian kebudayaan	19,05	Rp.10,038,703,072.00
TOTAL					Rp.1,831,957,516,855.00

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

Tabel 2.5 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
Indikator Sasaran		Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil Pada Level Kabupaten/Kota			
95,5	37,88	39,66	Rp.14,413,028,370.00	Rp.9,389,310,515.00	65.14%
Indikator Sasaran		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto			
2,56	1,92	75	Rp.9,121,479,450.00	Rp.8,918,816,570.00	97.78%
Indikator Sasaran		Pertumbuhan Realisasi Investasi			
5,00	5,87	117,40	Rp.1,785,988,000.00	Rp.1,499,277,793.00	83.95%
Indikator Sasaran		Tingkat Inflasi Daerah			
2,5	2,78	89,93	Rp.7,999,085,400.00	Rp.7,622,318,926.00	95.29%
Indikator Sasaran		Rasio Konektivitas			
0,811	0,805	99,26	Rp.214,490,371,026.00	Rp.204,563,308,744.00	95.37%
Indikator Sasaran		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Perkotaan			
63,61	114,17	179,48	Rp.77,358,166,071.00	Rp.50,450,251,508.22	84.83%
Indikator Sasaran		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum Permukiman Perkotaan			
85,19	51,03	59,90	Rp.104,743,116,458.00	Rp.93,738,348,044.33	89.49%
Indikator Sasaran		Rasio Gini			
0,334	0,338	98,82	Rp.55,391,034,395.00	Rp.51,877,703,189.00	93.66%
Indikator Sasaran		Tingkat Pengangguran Terbuka			
7,19	7,67	93,74	Rp.43,443,330,496.00	Rp.42,392,077,966.00	97.65%
Indikator Sasaran		Indeks Harmoni			
84,32	7,07	8,38	Rp.65,413,022,089.00	Rp.60,930,142,241.00	93.15%
Indikator Sasaran		Indeks Pendidikan			
75,16	75,49	100,44	Rp.535,646,254,249.00	Rp.493,115,960,425.00	92.06%
Indikator Sasaran		Indeks Kesehatan			
85	85	85	Rp.162,950,348,460.00	Rp.112,544,037,755.19	69.07%
Indikator Sasaran		Indeks Pelayanan Publik			
4,25	4,69	110,35	Rp.233,863,628,956.00	Rp.216,915,806,867.00	92.75%
Indikator Sasaran		Nilai SAKIP			
70,3	68,98	98,12	Rp.10,175,659,798.00	Rp.7,991,654,876.00	78.54%
Indikator Sasaran		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
70,3	68,98	98,12	Rp.43,648,058,264.00	Rp.23,969,078,092.00	54.91%
Indikator Sasaran		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)			
72,70	73,36	100,91	Rp.1,415,467,200.00	Rp.924,967,898.00	65.35%
Indikator Sasaran		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
68,74	65,55	95,36	Rp.138,894,998,001.00	Rp.130,164,584,871.00	93.71%
Indikator Sasaran		Indeks Resiko Bencana			
101,89	108,89	93,57	Rp.1,165,777,100.00	Rp.971,400,460.00	83.33%
Indikator Sasaran		Tingkat Pelestarian Kebudayaan			
19,05	21,43	112,49	Rp.10,038,703,072.00	Rp.9,527,533,700.00	94.91%

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja pada setiap indikator sasaran, teridentifikasi variasi yang signifikan dalam tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai sektor. Optimalisasi anggaran yang sangat menonjol terlihat pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Nilai SAKIP, di mana masing-masing mampu mencatatkan capaian kinerja sebesar 98,12% dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat efisien, yaitu sebesar 54,91% dan 78,54%. Tren efisiensi serupa juga tercermin pada indikator Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Kesehatan, yang berhasil merealisasikan target kinerja sebesar 100,91% dan 85% dengan penggunaan anggaran yang terkendali pada angka 65,35% dan 69,07%.

Selanjutnya, terdapat indikator yang menunjukkan tingkat produktivitas melampaui target (*over-performance*) yang substansial, seperti pada Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Perkotaan yang mencapai kinerja 179,48% dengan serapan anggaran sebesar 84,83%, serta Pertumbuhan Realisasi Investasi yang menyentuh angka 117,40% dengan realisasi anggaran sebesar 83,95%. Namun demikian, tantangan efisiensi masih teridentifikasi pada indikator Indeks Harmoni, di mana capaian kinerja hanya terealisasi sebesar 8,38% meskipun penyerapan anggaran telah mencapai 93,15%, serta Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum Permukiman Perkotaan dengan capaian kinerja 59,90% atas penyerapan anggaran sebesar 89,49%.

Secara umum, mayoritas indikator sasaran lainnya, termasuk Indeks Pendidikan (100,44%), Indeks Pelayanan Publik (110,35%), dan Tingkat Pelestarian Kebudayaan (112,49%), merepresentasikan pemanfaatan sumber daya yang sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan instansi dalam melampaui target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran yang rasional dan akuntabel pada kisaran 92% hingga 95%.

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan indikator paling efisien, di mana capaian kinerja sebesar 98,12% berhasil diraih dengan penyerapan anggaran yang sangat minimal, yaitu hanya 54,91%. Efisiensi tinggi juga terlihat pada Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencapai kinerja melampaui target sebesar 100,91% dengan serapan anggaran sebesar 65,35%, serta Indeks Kesehatan yang mencatatkan capaian 85% meskipun penggunaan anggaran baru berada di angka 69,07%. Sementara itu, dari sisi produktivitas sumber daya, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kawasan Perkotaan menunjukkan hasil yang luar biasa dengan capaian kinerja menyentuh 179,48% dari penggunaan anggaran sebesar 84,83%. Keberhasilan serupa dalam mengoptimalkan sumber daya untuk melampaui target kinerja (*output > 100%*) dengan serapan anggaran di bawah 95% juga ditemukan pada indikator Tingkat Pelestarian Kebudayaan (112,49%), Indeks Pelayanan Publik (110,35%), dan Pertumbuhan Realisasi Investasi (117,40%). Secara keseluruhan, capaian pada indikator-indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang direncanakan.

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

2.6 Program dan Kegiatan Pendukung Target Kinerja

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Kecil Dan Menengah, Koperasi, Usaha Mikro Dalam Perekonomian Daerah				
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5,648,518,500.00	4,021,683,505.00	71.20
2	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	323,378,000.00	271,892,400.00	84.08
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3,465,951,870.00	3,279,011,442.00	94.61
4	Program Pengembangan UMKM	4,975,180,000.00	1,816,723,168.00	36.52
Meningkatnya Sektor Kepariwisata Daerah				
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,279,425,000.00	1,191,059,070.00	93.09
2	Program Pemasaran Pariwisata	6,072,296,450.00	5,991,089,500.00	98.66
3	Program Pembangunan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,769,758,000.00	1,736,668,000.00	98,13
Meningkatnya Investasi Dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi				
1	Program Promosi Penanaman Modal	1,216,252,600.00	1,062,778,360.00	87.38
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	374,971,600.00	256,585,692.00	68.43
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	194,763,800.00	179,913,741.00	92.38
Meningkatnya Sektor Perdagangan di Kota Batam				
1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,437,205,400.00	2,103,518,926.00	86.31
2	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5,561,880,000.00	5,518,800,000.00	99,23
Meningkatnya Kualitas Konektivitas, Akseibilitas, Dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar				
1	Program Penyelenggaraan Jalan	169,688,302,668.00	163,107,644,867.00	96.12

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	39,955,241,510.00	36,861,544,169.00	92.26
3	Program Pengelolaan Pelayaran	4,846,826,848.00	4,594,119,708.00	94.79
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12,085,780,340.00	9,098,068,222.00	75.28
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	101,542,019,460.00	91,276,877,869.22	89.89
6	Program Penataan Bangunan Gedung	57,781,822,143.00	44,817,343,481.00	77.56
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,171,646,400.00	4,112,794,600.00	98.59
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,776,897,728.00	1,145,167,336.00	64.45
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	39,485,632,692.00	36,421,293,154.00	92.24
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	36,834,231,008.00	34,176,590,072.00	92.78
11	Program Kawasan Permukiman	10,547,904,768.00	8,481,679,161.00	80.41
12	Program Pengembangan Perumahan	17,875,347,990.00	14,658,785,657.33	82.01
13	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0.00	0.00	0.00
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan				
1	Program Pemberdayaan Sosial	2,376,808,000.00	1,954,780,200.00	82.24
2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10,638,224,000.00	9,752,733,031.00	91.68
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	22,345,299,000.00	21,526,650,956.00	96.34
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9,068,303,900.00	8,320,252,600.00	91.75
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,837,069,000.00	2,479,017,300.00	87.38

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	662,041,600.00	638,136,600.00	96.39
7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	78,193,000.00	65,616,000.00	83.92
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,736,599,895.00	6,521,549,500.00	96.81
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	648,496,000.00	618,967,002.00	95.45
Masyarakat Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Yang Terampil Dan Berkualitas				
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	41,829,540,012.00	41,106,918,600.00	98.27
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	933,541,484.00	757,202,804.00	81.11
3	Program Hubungan Industrial	561,939,000.00	441,495,562.00	78.57
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	118,310,000.00	86,461,000.00	73.08
Meningkatnya Keselarasan Dan Kesenjangan Hidup Bermasyarakat				
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4,630,681,500.00	4,202,070,808.00	90.74
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	54,763,888,230.00	51,406,463,945.00	93.87
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3,013,673,100.00	2,544,262,588.00	84.42
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2,237,817,759.00	2,181,742,700.00	97.49
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	17,223,000.00	13,858,000.00	80.46
6	Program Perlindungan Perempuan	101,923,500.00	56,696,200.00	55.63
7	Program Perlindungan Khusus Anak	323,095,000.00	279,450,000.00	86.49
8	Program Pengendalian Penduduk	324,720,000.00	245,598,000.00	75.63
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Dan Kesehatan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan				

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	493,933,124,249.00	454,793,711,337.00	92.08
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	60,000,000.00	57,658,000.00	96.10
3	Program Pembinaan Perpustakaan	507,555,000.00	476,184,350.00	93.82
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,832,850,000.00	1,744,571,200.00	95.18
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	39,312,725,000.00	36,043,835,538.00	91.68
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	162.950.348.460,00	112.544.037.755,19	69,07
Meningkatkan Pelayanan Publik				
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,508,788,312.00	6,031,923,138.00	92.67
2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,608,000.00	57,589,060.00	93.48
3	Program Pendaftaran Penduduk	4,735,677,500.00	4,521,030,500.00	95.47
4	Program Pencatatan Sipil	292,238,444.00	265,995,000.00	91.02
5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	81,977,408,000.00	74,854,399,773.00	91.31
6	Program Pengelolaan Arsip	57,646,000.00	50,737,500.00	88.02
7	Program Penatagunaan Tanah	1,579,610,100.00	1,343,259,690.00	85.04
8	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	136,997,405,600.00	128,261,688,260.00	93.62
9	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,137,605,000.00	1,052,175,000.00	92.49
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	98,900,000.00	95,980,000.00	97.05
11	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	416,742,000.00	381,028,946.00	91.43
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah				

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,532,044,900.00	1,435,411,434.00	93,69
2	Program Kepegawaian Daerah	2,245,879,898.00	1,630,825,710.00	72,61
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,397,735,000.00	4,925,417,732.00	76,99
Meningkatkan Akuntabilitas, Keuangan Daerah				
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	28.806.856.264,00	11.791.798.380,00	40,93
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.619.757.000,00	5.089.268.867,00	90,56
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.221.445.000,00	7.088.010.845,00	76,86
Peningkatan Pengawasan Tata Kelola Keuangan Daerah Dan Pencegahan Tindak Korupsi				
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,415,467,200.00	924,967,898.00	65,35
Meningkatnya Penggunaan Sumber Daya Alam Secara Efisien Dan Bertanggung Jawab Serta Pelestarian Lingkungan				
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	286.390.580,00	213.364.800,00	74,50
2	Program Pengelolaan Persampahan	138.608.607.421,00	129.951.220.071,00	93,75
Peningkatan Ketangguhan Dan Tanggap Bencana Wilayan				
1	Program Penanggulangan Bencana	491,084,600.00	379,967,460.00	77,37
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	674,692,500.00	591,433,000.00	87,66
Pemenuhan Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan				
1	Program Pengembangan Kebudayaan	6,059,670,072.00	5,917,515,916.00	97,65
2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	161,138,000.00	151,567,548.00	94,06
3	Program Pengelolaan Permuseuman	3,817,895,000.00	3,458,450,236.00	90,59

Sumber: LKjIP Kota Batam Tahun 2025

Secara keseluruhan, program kerja yang dijalankan telah cukup selaras dengan target kinerja makro, meskipun efektivitas dukungan anggarannya bervariasi secara signifikan antar sektor. Target pertumbuhan ekonomi dan UMKM didukung kuat oleh realisasi pemberdayaan UMKM yang mencapai 94,61%, sementara stabilitas harga pangan terjaga maksimal dengan capaian program 99,23%. Namun, akselerasi investasi dan pariwisata terhambat oleh rendahnya realisasi peningkatan daya tarik destinasi yang hanya 36,52%, serta belum adanya realisasi pada sistem penyediaan air minum yang merupakan infrastruktur dasar vital.

Di sektor sosial dan SDM, intervensi terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil positif dengan rata-rata serapan di atas 90%, didukung oleh kualitas pendidikan yang stabil di angka 92,08%. Kendala serius justru terlihat pada sektor kesehatan yang baru terealisasi 69,07% dan tata kelola keuangan daerah yang hanya mencapai 40,93%, yang mana hal ini berisiko melemahkan akuntabilitas kinerja daerah secara keseluruhan. Sementara itu, pelayanan publik dan pengelolaan persampahan telah memberikan kontribusi optimal dengan capaian di atas 90%, memastikan fungsi dasar pemerintahan tetap berjalan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan salah satu mekanisme pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, di mana pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat provinsi memberikan penugasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu yang menjadi kewenangan pemberi tugas. Dalam pelaksanaannya, Tugas Pembantuan memiliki dasar hukum yang jelas dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar utama penyelenggaraan Tugas Pembantuan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Tugas Pembantuan merupakan bentuk penugasan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah penerima tugas sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat atau provinsi.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengatur mekanisme pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Peraturan ini menegaskan peran gubernur dalam mengawasi dan memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan harus dikelola sesuai dengan mekanisme keuangan daerah dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya memberikan panduan teknis terkait pengelolaan dana dalam rangka pelaksanaan tugas ini.

Selain regulasi di atas, pelaksanaan Tugas Pembantuan juga mengacu pada berbagai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Teknis yang mengatur secara lebih spesifik berdasarkan sektor yang diberikan tugas pembantuannya. Misalnya, dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor lainnya, terdapat regulasi khusus yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, penyelenggaraan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota diharapkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah yang menerima tugas ini wajib melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemerintah pusat atau provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota merupakan bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Tugas Pembantuan ini diberikan baik oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga (K/L) maupun oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam

rangka menjalankan program strategis yang membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah.

Dalam setiap tahunnya, jumlah kementerian/lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota bervariasi tergantung pada kebijakan nasional dan prioritas pembangunan. Beberapa kementerian yang sering memberikan Tugas Pembantuan antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pertanian. Selain itu, beberapa lembaga nonkementerian seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga dapat memberikan tugas pembantuan dalam bidang tertentu.

Bidang urusan yang menjadi objek Tugas Pembantuan di kabupaten/kota meliputi berbagai sektor strategis, antara lain:

- a. Infrastruktur dan Perumahan – meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, sistem irigasi, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Kesehatan – mencakup pengadaan alat kesehatan, peningkatan fasilitas puskesmas, program imunisasi, dan penanganan stunting.
- c. Pendidikan dan Kebudayaan – meliputi pembangunan sarana prasarana sekolah, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan program pendidikan berbasis teknologi.
- d. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat – mencakup program bantuan sosial, perlindungan anak dan perempuan, serta penanggulangan kemiskinan.
- e. Pertanian dan Ketahanan Pangan – termasuk bantuan alat dan mesin pertanian, penyediaan benih unggul, dan penguatan kelompok tani.
- f. Lingkungan Hidup dan Kehutanan – meliputi program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber daya alam.

Setiap tahun, jumlah kegiatan yang dilakukan dalam rangka Tugas Pembantuan beragam sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi. Anggaran Tugas Pembantuan yang disalurkan ke kabupaten/kota dapat mencapai miliaran rupiah, bergantung pada skala proyek dan prioritas pembangunan nasional. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, yang kemudian dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Tugas Pembantuan di kabupaten/kota diawasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi guna memastikan efektivitas program serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Setiap daerah wajib menyusun laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan secara berkala, yang mencakup capaian kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

Meskipun program ini memiliki manfaat yang besar dalam percepatan pembangunan daerah, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain keterlambatan pencairan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kapasitas sumber daya manusia di daerah yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Batam tidak memperoleh tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tidak memiliki capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat maupun provinsi.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan adalah salah satu dari 6 bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Pusat. Pelaksana pada bidang urusan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Batam yang beralamat di Jl. Pramuka Komplek Perkantoran Sekupang Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Urusan Pendidikan terdapat 3 Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan
- Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian		Anggaran (Rp)
			Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Jiwa	200.090	170.385.701.300
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jiwa	5.817	2.370.906.030
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jiwa	13.982	22.321.177.520

4.1.3. Realisasi

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1	Pendidikan Anak Usia Dini					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	13982	13982	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	58.25	61.88	-3.63	100.00%
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	62.4	63.6	-1.2	100.00%
2	Pendidikan Dasar					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200090	2E+05	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	SD (2025)					100.00%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	70	70.1	-0.1	100.00%
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	54	57.53	-3.53	100.00%
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.16	75.09	-0.93	100.00%
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.8	72.51	-0.71	100.00%
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57.75	59.67	-1.92	100.00%
	SMP (2025)					100.00%
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	81	81.39	-0.39	100.00%
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	68.75	69.01	-0.26	100.00%
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.2	72.62	-0.42	100.00%
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.5	72.59	-1.09	100.00%
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.8	61.47	-0.67	100.00%
3	Pendidikan Kesetaraan					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

			Harus Dilayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5817	5817	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	43.05	43.83	-0.78	100.00%

4.1.4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	170.385.701.300	145.759.570.887	85,61%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.370.906.030	2.222.321.465	94,00%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	22.321.177.520	19.837.515.079	88,87%

4.1.5. Dukungan Personil

No	Jenis Personil	Status	Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
			L	P	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA
1	Guru Sekolah Dasar	ASN	672	1.738	41	2.326	2	17	0	24
		Honor	92	124	0	134	6	8	1	67
2	Guru Sekolah Menengah	ASN	173	436	17	591	0	1	0	0
		Honor	17	37	0	49	5	0	0	0
3	Guru Paud	ASN	0	58	1	57	0	0	0	0
		Honor	1	8	0	7	0	0	0	2

4	Guru Nonformal/Kesetaraan	ASN	4	1	0	5	0	0	0	0
		Honor	1	4	0	5	0	0	0	0

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
A	Pengumpulan Data	
	Tidak ada	
B	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada	
C	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada	
D	Pelaksanaan	
	Tidak ada	

4.2. Urusan Kesehatan

Bidang Urusan Kesehatan adalah salah satu dari 6 bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Pusat. Pelaksana pada bidang urusan ini adalah Dinas Kesehatan Kota Batam yang beralamat di Jl. Raja Haji No.7 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Urusan Kesehatan terdapat 12 Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia

4.2.2. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian		Anggaran
			Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	24.157	1.711.073.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	24.157	5.940.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	23.115	61.440.000
4	Pelayanan kesehatan balita	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	11.8472	9.900.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	196.612	1.226.600.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	879.418	85.400.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	78.123	19.040.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	225.021	6.600.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	16.280	19.420.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.166	401.254.000

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	36.047	806.585.520
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau <i>human immunodeficiency virus</i>	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	15.868	385.851.000

4.2.3. Realisasi

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			89.81%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					90.90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	72.17%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	24157	21793	2364	90.21%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.73%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.65%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	19329	17410	1919	90.07%
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	4348260	3917340	430920	90.09%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	24157	21793	2364	90.21%
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	24157	21793	2364	90.21%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	24157	21793	2364	90.21%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	3624	3269	355	90.20%
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	24157	21793	2364	90.21%

	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	24157	21793	2364	90.21%
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	24157	21793	2364	90.21%
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	1610	1453	157	90.25%
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	174	174	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	28	28	0	100.00%
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan	Orang	24157	21793	2364	90.21%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					89.41%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	70.23%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	24157	21206	2951	87.78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.19%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.93%
	1 . Formulir partograf	Formulir	24157	21206	2951	87.78%
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	24157	21206	2951	87.78%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	24157	21206	2951	87.78%
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	174	174	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%

	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	28	28	0	100.00%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					91.77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	72.57%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	23115	20968	2147	90.71%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.02%
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	23115	20968	2147	90.71%
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	23115	20968	2147	90.71%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	23115	20968	2147	90.71%
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	23115	20968	2147	90.71%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	23115	20968	2147	90.71%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23115	20968	2147	90.71%
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	174	174	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	29	29	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100.00%
	14 . Kader Kesehatan	Orang	4018	4018	0	100.00%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					81.72%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	64.09%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP :	Orang	118472	94904	23568	80.11%

	PELAYANAN KESEHATAN BALITA					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.64%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					88.19%
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	118472	94904	23568	80.11%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	118472	94904	23568	80.11%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	118472	94904	23568	80.11%
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	11558	10485	1073	90.72%
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	94385	75580	18805	80.08%
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	118472	94904	23568	80.11%
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	118472	94904	23568	80.11%
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	105	105	0	100.00%
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	1	1	0	100.00%
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	100.00%
	20 . Guru PAUD	Orang	2327	2327	0	100.00%
	21 . Kader kesehatan	Orang	4018	4018	0	100.00%
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					98.90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	79.08%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS	Orang	196612	194362	2250	98.86%

	DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.81%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.07%
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatan	Form/Bu ku	196612	194362	2250	98.86%
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/Bu ku	196612	194362	2250	98.86%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokume n	196612	194362	2250	98.86%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	196612	194362	2250	98.86%
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	196612	194362	2250	98.86%
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	702360	625030	77330	88.99%
	7 . Alat pemeriksaan Hb	Alat	137	137	0	100.00%
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	23718	23718	0	100.00%
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	21	21	0	100.00%
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	66478	66478	0	100.00%
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	217	217	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	4652	4652	0	100.00%
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	4018	4018	0	100.00%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					83.83%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	64.82%

			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	879418	712589	166829	81.03%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.01%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	428	428	0	100.00%
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	168	168	0	100.00%
	4 . Alat : Glukometer	Unit	158	158	0	100.00%
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	137	137	0	100.00%
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	879418	712589	166829	81.03%
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	879418	712589	166829	81.03%
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	879418	712589	166829	81.03%
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	21	21	0	100.00%
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	879418	712589	166829	81.03%
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	79	79	0	100.00%
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	44	44	0	100.00%
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	35	35	0	100.00%
	c. Vasektomi set	Unit	0	0	0	0.00%
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	879418	712589	166829	81.03%
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	36834	36834	0	100.00%
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	100.00%

	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3990	3990	0	100.00%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					65.06%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	47.55%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	78123	46438	31685	59.44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.50%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					87.52%
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	42	42	0	100.00%
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	78147	46438	31709	59.42%
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	78147	46438	31709	59.42%
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	78147	46438	31709	59.42%
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	78147	46438	31709	59.42%
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	78147	78147	0	100.00%
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	21	21	0	100.00%

8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					84.53%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	65.15%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	225021	183259	41762	81.44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.38%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					96.91%
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	2 . Obat Hipertensi	Paket	225021	183259	41762	81.44%
	3 . Tensimeter	Unit	160	160	0	100.00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	225021	183259	41762	81.44%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	29	29	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	16280	16392	-112	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%

			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	16280	16392	-112	100.00%
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	158	158	0	100.00%
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	16280	16392	-112	100.00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	16280	16392	-112	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	21	21	0	100.00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	28	28	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	28	28	0	100.00%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					97.78%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	1166	1349	-183	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.78%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM)					88.89%

	YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	21	21	0	100.00%
	2 . Penyediaan Psikofarmaka	Paket	7	7	0	100.00%
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	114781	114781	0	100.00%
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	114781	114781	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	0	100.00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	174	174	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	21	21	0	100.00%
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0	0.00%
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	21	21	0	100.00%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					94.15%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	74.15%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	36047	33410	2637	92.68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	2 . Reagen Zn TB	Kit	193	193	0	100.00%
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	3600	3600	0	100.00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5833	5833	0	100.00%

	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	36047	36047	0	100.00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	10	10	0	100.00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	6	6	0	100.00%
	8 . Tuberkulin	Vial	604	604	0	100.00%
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	174	174	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	62	62	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	28	28	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	100.00%
	15 . Kader Kesehatan	Orang	123	123	0	100.00%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					99.71%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	15868	15868	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.71%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.57%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	0	100.00%
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	15868	15868	0	100.00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang	Paket	15868	15868	0	100.00%

	sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai					
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	350	350	0	100.00%
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	174	174	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	353	353	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	215	215	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	28	28	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	29	29	0	100.00%
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	21	18	3	85.71%

4.2.4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1,711,073,000	1,595,841,640	93.27%
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	5,940,000	5,760,000	96.97%
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	61,440,000	54,956,405	89.45%
4	pelayanan kesehatan balita	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	9.900.000	9,600,000	96.97%
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,226,600,000	1,144,458,000	93.30%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	85,400,000	83,200,000	97.42%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	19,040,000	18,640,000	97.90%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	6,600,000	6,400,000	96.97%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	19,420,000	18,940,000	97.53%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	401,254,000	373,498,000	93.08%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	806,585,520	741,525,000	91.93%

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau <i>human immunodeficiency virus</i>	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	385,851,000	362,140,000	93.85%
----	--	--	-------------	-------------	---------------

4.2.5. Dukungan Personil

No	Jenis Personil	Status	Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
			L	P	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA
1	Dokter	ASN	19	96	1	114	-	-	-	-
2		Honor	1	-	-	1	-	-	-	-
3		dll	-	3	-	3	-	-	-	-
4	Dokter Gigi	ASN	3	35	2	36	-	-	-	-
5		dll	-	1	-	1	-	-	-	-
6	Bidan	ASN	-	358	1	70	287	-	-	-
7		Honor	-	6	-	2	4	-	-	-
8		dll	-	5	-	-	5	-	-	-
9	Perawat	ASN	49	182	-	70	161	-	-	-
10	Tenaga Kefarmasian	ASN	11	55	1	34	31	-	-	-
11		Honor	1	-	-	1	-	-	-	-
12	Tenaga Gizi	ASN	3	25	-	7	21	-	-	-
13	Tenaga Promosi Kesehatan	ASN	5	17	2	20	-	-	-	-
14	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ASN	5	30	-	12	22	-	1	-
15	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	ASN	4	25	-	1	28	-	-	-

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Skrining HIV & PIMS populasi kunci telah di laksanakan tetapi masih banyak data yang belum terinput dan sistem informasi HIV (SIHA) penarikan data baru bisa di lakukan pada tanggal 6 bulan berikutnya	-
2	Kekurangan logistik BMHP sebagai alat utama dalam pemeriksaan terduga TBC	-
3	pelayanan kesehatan pada kesehatan jiwa sudah berjalan dengan baik namun terkendala di pencatatan dan pelaporan karna ada perbaikan pada aplikasi SIMKESWA	-
4	Belum Optimalnya capaian program - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan - Capaian	-

	skrining deteksi dini daerah hinterland masih rendah - Masih rendahnya data inputan di Aplikasi ASIK	
5	capaian Screening lansia masih rendah pencatatan dan pelaporan belum optimal	-
6	Belum semua sasaran anak yang diluar satuan pendidikan/ anak yang putus sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga mempengaruhi capaian pelaporan	-
7	Masih ada sasaran yg belum dilaporkan, khusus di daerah hinterland sasaran yang terlalu tinggi	-
8	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil sudah berjalan dengan baik namun terkendala di pencatatan dan pelaporan	-
9	pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sudah berjalan dengan baik namun terkendala di pencatatan dan pelaporan	-

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah salah satu dari 6 bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Pusat. Pelaksana pada bidang urusan ini adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang beralamat di Jl. Kartini I No.29 Sekupang, Kota Batam.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian		Anggaran (Rp)
			Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Rumah Tangga	1.392	56.972.774.813
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan Pengolahan Air limbah Domestik	Rumah Tangga	532	4.171.646.400

4.3.3. Realisasi

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1392	1392	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	JARINGAN PERPIPAAN					100.00%
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	15734	15734	0	100.00%
Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	15734	15734	0	100.00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00%
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	7702	7702	0	100.00%
Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	7702	7702	0	100.00%

2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	532	532	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%
	KUANTITAS SPALD					100.00%
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	15734	15734	0	100.00%
	KUALITAS SPALD					100.00%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	15734	15734	0	100.00%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua						
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	295065	0	295,065.00	100.00%
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	6611	6611	0	100.00%

4.3.4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	56.972.774.813	54.731.754.911	96,07%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan Pengolahan Air limbah Domestik	4.171.646.400	4.112.794.600	98,59%

4.3.5. Dukungan Personil

No	Jenis Personil	Status	Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
			L	P	S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD
1	Personil Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) UPT Pengelolaan Air Bersih	ASN	4	4	-	6	1	1	-	-
		Honoror	82	6	-	8	1	65	6	8
		BLUD	17	2	-	2	1	13	1	2
2	Personil Pengelolaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	ASN	10	-	1	7	1	1	-	-
		Honoror	2	2	-	3	-	1	-	-

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
A	Pengumpulan Data	
	Tidak ada	
B	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada	
C	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada	
D	Pelaksanaan	
	Tidak ada	

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah salah satu dari 6 bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Pusat. Pelaksana pada bidang urusan ini adalah Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam yang beralamat di Jl. Kartini I No.29 Sekupang, Kota Batam.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

4.4.2. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian		Anggaran (Rp)
			Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	225.297.050
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terdentifikasinya lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1	67.500.000,00

4.4.3. Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%

	Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Tidak terjadi bencana pada tahun 2024, sehingga hanya dilakukan pendataan dan identifikasi	1	1	-	100.00 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Tidak terdapat warga yang terdampak program relokasi pemerintah	1	1	-	100.00 %

4.4.4. Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	225.297.050,00	194.929.000,00	86,52
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terdentifikasinya lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00

4.4.5. Dukungan Personil

No	Jenis Personil	Status	Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
			L	P	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA
1	Kabid Perumahan	ASN	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Kasubag Perencanaan dan Program	ASN	-	1	1	-	-	-	-	-
3	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Permukiman	ASN	5	-	-	4	1	-	-	-
4	Penata Kelola Perumahan	ASN	2	1	-	3	-	-	-	-
5	Pranata Komputer	ASN	1	1	-	2	-	-	-	-
6	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	ASN	1	-	-	1	-	-	-	-
7	Pengelola Perumahan dan Permukiman	ASN	1	-	-	-	1	-	-	-

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
A	Pengumpulan Data	
1	Belum adanya SK lokasi Bencana Kota Batam	
2	Belum adanya peta bencana	
3	Adanya penolakan warga terhadap pengumpulan data	
4	Tidak ada permukiman yang terdampak program pemerintah	
B	Penghitungan Kebutuhan	
1	Tidak bisa dilakukan penghitungan kebutuhan dikarenakan belum adanya SK lokasi Bencana dan belum adanya peta bencana	
2	Tidak ada permukiman yang terdampak program pemerintah	
C	Perencanaan dan Penganggaran	
1	Perencanaan dan penganggaran hanya dapat dilaksanakan pada kegiatan pendataan dan identifikasi dikarenakan belum adanya SK lokasi Bencana dan belum adanya peta bencana	
2	Permukiman yang terdampak program pemerintah merupakan permukiman ilegal	
D	Pelaksanaan	
1	Adanya penolakan warga saat dilakukan pendataan	

2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana / terdampak program pemerintah tidak memenuhi ekspektasi Masyarakat	
---	---	--

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Trantibunlinmas adalah salah satu dari 6 bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Pusat. Pelaksana pada bidang urusan ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam dan Saruan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Trantibunlinmas terdapat 5 Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- Kesiap Siagaan Terhadap Bencana
- Evakuasi Korban Bencana
- Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian		Anggaran (Rp)
			Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	Orang	87	1.644.168.100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	orang	100	47,689,000
3	Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	300	27,366,000
4	Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	10	37,550,000

5	Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	189	201,980,000
---	---------------------------	--	-------	-----	-------------

4.5.3. Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI PENCAPPAIAN SPM TRANTIBUM					95.44%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota				95.44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	87	87	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.44%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	77.20%
	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	9	9	-	100.00 %
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	13	13	-	100.00 %
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	182	115	67	63.19 %

	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	-	-	-	0.00 %
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-	-	100.00 %
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-	-	100.00 %
KATEGORI PENCAPPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	300	300	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	-	100.00 %
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	1	1	-	100.00 %
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100	100	-	100.00 %
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	3	3	-	100.00 %

2	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	300	300	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	97	97	-	100.00 %
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	353	353	-	100.00 %
3	Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Tidak Terjadi Bencana	1	1	-	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00%
1	Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	300	300	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%

	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	100	189	-89	100.00 %
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	6	6	-	100.00 %
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	700	700	-	100.00 %
	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	95	95	-	100.00 %
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100	189	-89	100.00 %
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100	189	-89	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	1.644.168.100	1.502.737.900	91.40
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	47,689,000	43,655,600	91.54

3	Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	27,366,000	25,655,000	93.75
4	Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37,550,000	-	0.00
5	Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	201,980,000	175,374,380	86.83

4.5.5. Dukungan Personil

No	Jenis Personil	Status	Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
			L	P	S2	S1/D4	D3	D2	SMA	SD
1	Satpol PP	PNS	175	7	7	63	3	-	-	109
		PPPK	17	5	-	17	5	-	-	-
		Non ASN	357	39	1	7	1	-	-	387
2	Petugas Pemadam Kebakaran	PNS	20	-	1	7	-	-	11	1
		PPPK	57	2	-	-	-	-	59	-

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
A	Pengumpulan Data	
	Tidak ada	
B	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada	
C	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada	
D	Pelaksanaan	
	Tidak ada	

4.6. Urusan Sosial

Bidang Urusan Sosial adalah salah satu dari 6 bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Pusat. Pelaksana pada bidang urusan ini adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Sosial terdapat 5 Jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti
- Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana

4.6.2. Target Pencapaian

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target Capaian		Anggaran (Rp)
			Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Orang	161	292.214.000,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Orang	40	111.082.000,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Orang	376	150.000.000,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	Orang	440	559.654.000,00

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana daerah kab/ Kota	Orang	1165	800.890.000,00
---	--	--	-------	------	----------------

4.6.3. Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	20	20	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Layanan data dan pengaduan	20	20	-	100.00 %
	Penyediaan Permakanan	20	20	-	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	20	20	-	100.00 %
	Penyediaan sandang	20	20	-	100.00 %
	Penyediaan alat bantu	20	20	-	100.00 %
	Penyediaan perbekalan kesejatan	20	20	-	100.00 %
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20	20	-	100.00 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	20	20	-	100.00 %
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	20	20	-	100.00 %
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20	20	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	20	20	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	-	100.00 %

	Layanan rujukan	20	20	-	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	18	18	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Layanan data dan pengaduan	18	18	-	100.00 %
	Penyediaan Permakanan	18	18	-	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	18	18	-	100.00 %
	Penyediaan sandang	18	18	-	100.00 %
	Penyediaan perbekalan kesejatan	18	18	-	100.00 %
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	18	18	-	100.00 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	18	18	-	100.00 %
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	18	18	-	100.00 %
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	18	18	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	18	18	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	18	18	-	100.00 %
	Layanan rujukan	18	18	-	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	360	360	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%

	Layanan data dan pengaduan	360	360	-	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	360	360	-	100.00 %
	Penyediaan permakanan	360	360	-	100.00 %
	Penyediaan sandang	360	360	-	100.00 %
	Penyediaan alat bantu	360	360	-	100.00 %
	Penyediaan perbekalan kesehatan	360	360	-	100.00 %
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	360	360	-	100.00 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar	360	360	-	100.00 %
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	360	360	-	100.00 %
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	360	360	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	360	360	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	360	360	-	100.00 %
	Layanan rujukan	360	360	-	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	550	550	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Layanan data dan pengaduan	550	550	-	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	550	550	-	100.00 %
	Penyediaan permakanan	550	550	-	100.00 %
	Penyediaan sandang	550	550	-	100.00 %
	Penyediaan perbekalan kesehatan	550	550	-	100.00 %
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	550	550	-	100.00 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	550	550	-	100.00 %

	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	550	550	-	100.00 %
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	550	550	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	550	550	-	100.00 %
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	550	550	-	100.00 %
	Layanan rujukan	550	550	-	100.00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	550	550	-	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	Penyediaan permakanan	512	512	-	100.00 %
	Penyediaan sandang	15	15	-	100.00 %
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	3	-	100.00 %
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	512	512	-	100.00 %
	Pelayanan dukungan Psikososial	512	512	-	100.00 %

4.6.4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	292.214.000,00	262.505.500,00	90.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	111.082.000,00	85.500.247,00	76.00

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	150.000.000,00	120.106.753,00	80.00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	559.654.000,00	550.775.000,00	98.00
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana daerah kab/ Kota	800.890.000,00	693.923.295,00	87.00

4.6.5. Dukungan Personil

No	Jenis Personil	Status	Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
			L	P	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA
1	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Honoror	13	1	-	-	-	-	-	14
2	Peksos	Honoror	2	2	-	4	-	-	-	-
3	TKSK	Relawan	10	2	-	2	-	-	-	10
4	Pendamping Disabilitas	Relawan	4	6	-	3	-	-	-	7
5	Pengasuh	Honoror	1	4	-	-	-	-	-	5

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
A	Pengumpulan Data	
	Tidak ada	
B	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada	
C	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada	
D	Pelaksanaan	
	Tidak ada	

4.7. Program dan Kegiatan

A. Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				212,814,701,573	184,463,400,226	86.68%
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			22,321,177,520	19,837,515,079	88.87%
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,441,963,500	1,389,290,208	96.35%
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	16,536,244,320	14,434,072,008	87.29%
		3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,020,960,000	1,010,676,465	98.99%
		4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1,091,986,000	911,107,942	83.44%
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	143,176,700	129,214,756	90.25%
		6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	469,000,000	458,023,000	97.66%
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1,000,212,000	987,207,700	98.70%
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	617,635,000	517,923,000	83.86%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629			97,143,769,800	83,933,399,141	86.40%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	4,000,173,600	425,723,300	10.64%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	18,416,570,000	12,463,056,000	67.67%
		3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	9,678,158,200	8,531,723,008	88.15%
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	12,010,662,800	11,413,304,393	95.03%
		5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	14,016,459,000	12,673,507,990	90.42%
		6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	36,326,971,200	35,976,988,452	99.04%
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1,791,484,000	1,769,055,998	98.75%
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	903,291,000	680,040,000	75.28%

	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647			73,241,931,500	61,826,171,746	84.41%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	7,346,674,200	5,110,745,053	69.57%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	11,057,734,200	9,945,752,160	89.94%
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	17,676,980,000	12,121,809,500	68.57%
		4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	12,554,874,000	10,563,600,841	84.14%
		5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	10,063,768,000	9,718,211,500	96.57%
		6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	13,076,181,600	12,919,672,808	98.80%
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	465,719,500	446,379,884	95.85%
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%
	4	Pendidikan Kesetaraan			60,000,000	57,658,000	96.10%
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	60,000,000	57,658,000	96.10%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				2,370,906,030	2,222,321,465	94%
		1			7,164,824,183	6,860,406,350	95.75%
		2			639,672,000	605,976,000	94.73%
		3			6,262,929,040	6,174,554,023	98.59%
		4			3,609,491,500	2,945,398,422	81.60%
		4 2025 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP) 1201559			1,560,028,200	1,541,033,885	98.78%
		4 2025 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1201588			336,963,630	319,427,868	94.80%

		4 2025 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1201611	78,050,000	0	0.00%	
		4 2025 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1201619	179,211,200	159,278,712	88.88%	
		4 2025 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Nonformal/Kesetaraan) 1201622	4,050,000	3,800,000	93.83%	
		4 2025 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (Nonformal/Kesetaraan) 1201627	212,603,000	198,781,000	93.50%	

B. Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4,739,103,520	4,414,959,045	93.16%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			4,739,103,520	4,414,959,045	93.16%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,711,073,000	1,595,841,640	93.27%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	5,940,000	5,760,000	96.97%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	61,440,000	54,956,405	89.45%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	9,900,000	9,600,000	96.97%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1,226,600,000	1,144,458,000	93.30%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	85,400,000	83,200,000	97.42%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	19,040,000	18,640,000	97.90%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	6,600,000	6,400,000	96.97%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	19,420,000	18,940,000	97.53%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	401,254,000	373,498,000	93.08%
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	806,585,520	741,525,000	91.93%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	385,851,000	362,140,000	93.85%

C. Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN
	KOTA BATAM				67,368,061,434	64,444,682,021	95.66%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				56,972,774,813	54,731,754,911	96.07%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			56,972,774,813	54,731,754,911	96.07%
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	432,900,000	267,185,000	61.72%
		2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	25,885,399,843	24,905,406,421	96.21%
		3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	11,471,624,000	11,176,737,608	97.43%
		4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	18,291,742,970	17,499,333,382	95.67%
		5	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	891,108,000	883,092,500	99.10%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4,171,646,400	4,112,794,600	98.59%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			4,171,646,400	4,112,794,600	98.59%
		1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	4,171,646,400	4,112,794,600	98.59%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Peningkatan Pelayanan BLUD		6,223,640,221	5,600,132,510	89.98%

D. Urusan Perumahan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN
	KOTA BATAM				245,202,000	241,380,000	98.44%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				245,202,000	241,380,000	98.44%

	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			245,202,000	241,380,000	98.44%
		1	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	74,100,000	74,100,000	100.00%
		2	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	74,400,000	74,400,000	100.00%
		3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	96,702,000	92,880,000	96.05%

E. Urusan Trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN
	KOTA BATAM				3,688,131,800	3,135,695,588	85.02%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				3,013,439,300	2,544,262,588	84.43%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			1,566,496,000	1,166,263,728	74.45%
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1,368,000	820,000	59.94%
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	5,334,000	5,290,000	99.18%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	850,000	453,000	53.29%
		4	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	12,316,000	8,940,000	72.59%
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	32,590,000	14,175,000	43.49%
		6	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	15,580,000	14,660,000	94.09%
		7	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	59,640,000	43,320,000	72.64%
		8	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	864,100,000	678,058,000	78.47%
		9	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	50,000,000	0	0%
		10	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	524,718,000	400,547,728	76.34%

	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			1,384,659,300	1,321,512,000	95.44%
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	19,774,000	19,304,000	97.62%
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	1,236,185,300	1,180,308,000	95.48%
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	128,700,000	121,900,000	94.72%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			62,284,000	56,486,860	90.69%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	62,284,000	56,486,860	90.69%
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				674,692,500	591,433,000	87.66%
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			549,001,000	470,201,000	85.65%
		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	117,689,000	105,781,000	89.88%
		2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	58,996,000	56,020,000	94.96%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	372,316,000	308,400,000	82.83%
	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			125,691,500	121,232,000	96.45%
		1	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	125,691,500	121,232,000	96.45%

F. Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SERAPAN
	KOTA BATAM				2,935,171,200	2,539,406,162	86.52%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,935,171,200	2,539,406,162	86.52%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			2,359,339,200	1,998,965,229	84.73%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	133,343,000	81,595,000	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	79,728,000	49,704,998	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	379,584,600	355,709,500	0%

		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	753,942,600	616,456,395	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	702,962,000	672,879,536	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	72,375,000	38,140,000	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	237,404,000	184,479,800	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,359,339,200	1,998,965,229	84.73%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			575,832,000	540,440,933	93.85%
		1	Penyediaan makanan	Orang	575,832,000	540,440,933	93.85%

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama satu tahun terakhir.

Melalui laporan ini, dapat disimpulkan bahwa berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Batam. Berbagai capaian positif telah diraih, baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengedepankan prinsip *good governance*, inovasi, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan terus diperkuat guna mewujudkan Kota Batam yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2024. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang, demi pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Batam.

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	34044	49195	69.2021547	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	232133	233020	99.619346	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	5319	5390	98.6827458	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	1200	1834	65.4307525	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	2326	3643	63.8484765	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	32	21243	0.1506379	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	183259	225021	81.4408433	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	16280	16280	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1166	1166	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	33410	36047	92.6845507	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	15868	15868	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	785	57050	1.375986	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	21793	24157	90.2140166	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	21206	24157	87.7840791	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	20968	23115	90.7116591	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	94904	118472	80.1066919	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	194362	196612	98.8556141	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	712589	879418	81.0296128	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	46438	78123	59.4421617	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	542	598	90.6354515	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	1105.88	1234.62	89.5725	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	1365266	1365266	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	341317	341317	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	5	99.22	5.0393066	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	1038	1069	97.1000935	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	315	319	98.7460815	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	91.47	125	73.176	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	33	33	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	389	389	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	1	3	33.3333333	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	119	119	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	17	17	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	468195	468195	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	185	185	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	113	114	99.122807	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	119	200	59.5	%	Lihat Dokumen	Disetujui
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	83	160	51.875	-	Lihat Dokumen	Disetujui
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	25	38	65.7894737	-	Lihat Dokumen	Disetujui
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	469	550	85.2727273	-	Lihat Dokumen	Disetujui
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	863	863	100	-	Lihat Dokumen	Disetujui
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	4000	19814	20.187746	-	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	15	15	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	3061	7066	43.3201245	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2204	2204	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	268	268	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	70	70	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	35.59	67.93	52.3921684	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	1823864.13	7339109	24.8513018	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	768.38	125865	0.6104795	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	53827.59	125865	42.7661304	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	83	107	77.5700935	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	364616	452093	80.6506626	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	420246	427965	98.1963478	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	258427	407913	63.3534602	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	978579	986550	99.1920328	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	28842	28842	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	110397	110397	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	2794	2794	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	1	1	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2.14	2.14	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	134956	196242	68.7701919	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	4.4	11	40	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	-	0.83	-	0.83	Rasio	Lihat Dokumen	Disetujui
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0.56	-	0.56	Rasio	Lihat Dokumen	Disetujui
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	298	298	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	27	45	60	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	11	14	78.5714286	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	1113374	1365266	81.549969	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	405,996,544,106	251,871,061,351	61.1922155	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	653	889	73.4533183	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	44,193,463,473,871	25,462,025,000,000	73.5661774	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
2.i.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	44,193,463,473,871	37,390,000,000,000	118.195944	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	137	120	114.1666667	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	88492	358995	24.6499255	-	Lihat Dokumen	Disetujui
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	11	23	47.826087	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	41	98	41.8367347	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	1692	1990	85.0251256	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	736	918	80.1742919	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	19	29	65.5172414	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	8072	10773	-25.0719391	%	Lihat Dokumen	Disetujui
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	61.13	-	61.13	Nilai	Lihat Dokumen	Disetujui
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	12.36	-	12.36	Nilai	Lihat Dokumen	Disetujui
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	97.08	-	97.08	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	44138.62	11147.18	395.9622075	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	33.26	-	33.26	Kg / Kap / Tahun	Lihat Dokumen	Disetujui
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	395,296,351,508	44,193,463,473,871	0.8944679	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	1613202	1326831	21.5830803	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	2102849	1791240	17.396273	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	14115.25	13391.55	5.4041541	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	20982	21881	-4.1085874	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	32803	29105	12.7057207	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	528	642	82.2429907	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	4993	5231	95.4502007	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	48	-	48.00	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	93	210	44.2857143	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	210	198	6.0606061	%	Lihat Dokumen	Disetujui
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	399,553,540,000	410,553,540,000	97.3206905	%	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1,668,699,982,063	4,430,459,623,302	37.6642634	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	2,253,056,374,966	4,144,664,860,344	54.3603995	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2,310,158,555,426	4,006,752,859,321	57.6566271	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1,534,435,282,079	4,422,959,623,302	34.6925003	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2996	5497	54.5024559	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	116	132	87.8787879	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2.643	-	2.643	Nilai	Lihat Dokumen	Disetujui
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2.37	-	2.37	Nilai	Lihat Dokumen	Disetujui
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2.498	-	2.498	Nilai	Lihat Dokumen	Disetujui

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Data Dukung	Status Reviu APIP
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	65	65	100	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40	Poin	Lihat Dokumen	Disetujui
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	27.05	-	27.05	Poin	Lihat Dokumen	Disetujui
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	21.75	-	21.75	Poin	Lihat Dokumen	Disetujui
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	Lihat Dokumen	Disetujui
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	6	8	75	%	Lihat Dokumen	Disetujui
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	73.08	-	73.08	Nilai	Lihat Dokumen	Disetujui

No	Aksi		IKK	Capaian 2024	Capaian 2025	Laju	Satuan	Data Dukung	Keterangan	Status Reviu APIP
1	Reviu	History	Indeks Pembangunan Manusia	83.32	83.8	0.58	%	Lihat File	Lihat Keterangan	OK
2	Reviu	History	Persentase Penduduk Miskin	4.85	3.81	-21.44	%	Lihat File	Lihat Keterangan	OK
3	Reviu	History	Tingkat Pengangguran Terbuka	50.431	49.931	-0.99	%	Lihat File	Lihat Keterangan	OK
4	Reviu	History	Pertumbuhan Ekonomi	6.69	6.76	1.05	%	Lihat File	Lihat Keterangan	OK
5	Reviu	History	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	182.51	195.56	7.15	%	Lihat File	Lihat Keterangan	OK
6	Reviu	History	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)□	0.348	0.386	10.92	%	Lihat File	Lihat Keterangan	OK

